



PEMERINTAH  
KOTA PEKALONGAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa



*Pekalongan*  
World's City of Batik

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

**BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA PEKALONGAN**  
Jl. Mataram No.1 Kota Pekalongan 51111  
Telp. (0285) 421093 Fax. (0285) 424061



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Pemerintah Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Pekalongannya itu “MEWUJUDKAN KOTA PEKALONGAN YANG LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI DAN RELIGIUS”, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Pekalongan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan

serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Pekalongan, 27 Maret 2024

 WALIKOTA PEKALONGAN  
  
HOACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kota Pekalongan sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean government dan good governance, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Kota Pekalongan Tahun 2023 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2023 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi pembangunan Kota Pekalongan **“MEWUJUDKAN KOTA PEKALONGAN YANG LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI DAN RELIGIUS”**.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada didalam LKjIP tersebut diharapkan segenap *stakeholders* di Pemerintah Kota Pekalongan dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekalongan di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekalongan pada tahun 2023 dapat dikatakan Berhasil. Capaian kinerja pemerintahan Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan



berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 24 sasaran strategis dengan 30 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Pekalongan Tahun 2023 menunjukkan bahwa:

- ❖ Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 24 sasaran strategis, sebanyak 19 sasaran (79,16%) dengan kategori “Sangat Berhasil”, 2 sasaran (8,33%) dengan kategori “Cukup Berhasil”, 1 sasaran (4,16%) dengan kategori “Sangat Tidak Berhasil”, 2 sasaran (4,16%) belum dapat dikategorikan karena data belum tersedia. Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar **“89,83”** dengan kategori **“Berhasil”**.
- ❖ Pengukuran terhadap 30 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 23 indikator (76,66%) dikategorikan "Sangat berhasil", 1 indikator (3,34%) dikategorikan “Berhasil”, 3 indikator (10,00%) dikategorikan “Tidak Berhasil”, 1 indikator (3,33%) dikategorikan “Sangat Tidak Berhasil”, 2 indikator (6,66%) belum dapat dikategorikan karena data belum tersedia.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 GAMBARAN UMUM KOTA PEKALONGAN.....	2
1.3 PERTUMBUHAN EKONOMI.....	6
1.4 KONDISI PEMERINTAHAN .....	9
1.5 KONDISI APARATUR .....	11
1.6 ISU STRATEGIS.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026.....	13
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	27
2.3 PERJANJIAN KINERJA .....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	34
3.1 PENGUKURAN KINERJA .....	35
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	38
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	119
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH .....	130
BAB IV PENUTUP.....	133
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan.....	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	6
Tabel 1.3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan, 2019-2023.....	7
Tabel 1.4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen).....	8
Tabel 1.5	Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekalongan.....	8
Tabel 1.6	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2023.....	11
Tabel 1.7	Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	11
Tabel 1.8	Isu Strategis Kota Pekalongan Tahun 2023.....	12
Tabel 2.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.....	24
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.....	28
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Pemerintah Kota Pekalongan.....	28
Tabel 3.1	Pengukuran dengan Skala Ordinal.....	32
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023.....	37
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.....	39
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir RPJMD 2026.....	40
Tabel 3.5	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2023.....	42
Tabel 3.6	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.....	44
Tabel 3.7	Persentase Kategori Capaian Indikator Kinerja Menurut Misi.....	46
Tabel 3.8	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.....	48
Tabel 3.9	Perbandingan Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan dengan	



	Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....	48
Tabel 3.10	Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2021-2023.....	51
Tabel 3.11	Perbandingan Angka Kematian Ibu Kota Pekalongan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	51
Tabel 3.12	Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Pekalongan Tahun 2021-2023.....	53
Tabel 3.13	Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Pekalongan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	53
Tabel 3.14	Kasus Kematian Balita dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan Tahun 2021-2023.....	55
Tabel 3.15	Perbandingan Angka Kematian Balita (AKABA) Kota Pekalongan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	55
Tabel 3.16	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2.....	57
Tabel 3.17	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3.....	58
Tabel 3.18	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	59
Tabel 3.19	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4.....	61
Tabel 3.20	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5.....	62
Tabel 3.21	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6.....	65
Tabel 3.22	Perbandingan Kategori Kota Layak Anak dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023.....	66
Tabel 3.23	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7.....	68
Tabel 3.24	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	68
Tabel 3.25	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8.....	71
Tabel 3.26	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9.....	73
Tabel 3.27	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10.....	75
Tabel 3.28	Perbandingan Indeks Kualitas Air dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	76
Tabel 3.29	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11.....	77



Tabel 3.30	Perbandingan Indeks Kualitas Lahan dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	78
Tabel 3.31	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 12.....	79
Tabel 3.32	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 13.....	81
Tabel 3.33	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 14.....	83
Tabel 3.34	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 15.....	84
Tabel 3.35	Rekapitulasi Prosentase Kondisi Jalan Tahun 2023.....	87
Tabel 3.36	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 16.....	89
Tabel 3.37	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 17.....	93
Tabel 3.38	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 18.....	95
Tabel 3.39	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 19.....	98
Tabel 3.40	Perbandingan Indeks SPBE dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	98
Tabel 3.41	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 20.....	101
Tabel 3.42	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 21.....	105
Tabel 3.43	Perbandingan Indeks Merit System dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	106
Tabel 3.44	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 22.....	110
Tabel 3.45	Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2023.....	110
Tabel 3.46	Top 7 (Tujuh) Nilai Evaluasi AKIP di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	111
Tabel 3.47	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 23.....	113
Tabel 3.48	Perbandingan Opini BPK Tahun 2022.....	114
Tabel 3.49	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 24.....	116
Tabel 3.50	Realisasi Anggaran Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2024 (Unaudited tanggal 1 Maret 2024) .....	122
Tabel 3.51	Perkembangan PAD Kota Pekalongan Tahun 2018-2023.....	123
Tabel 3.52	Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Pekalongan Tahun 2017-2023.....	124
Tabel 3.53	Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Pekalongan Tahun 2017-2023.....	125



Tabel 3.54	Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 Per 01 Januari s.d 31 Desember 2023 (Unaudited tanggal 1 Maret 2024) .....	126
Tabel 3.55	Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017-2022.....	127
Tabel 3.56	Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017-2023.....	127
Tabel 3.57	Target dan Realisasi Belanja Hibah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017-2022.....	128
Tabel 3.58	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017-2023.....	128
Tabel 3.59	Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017-2023.....	129
Tabel 3.60	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017-2023.....	129
Tabel 3.61	Perkembangan Pembiayaan Kota Pekalongan tahun 2017-2023.....	130



## DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 3.1	IDG Kota Pekalongan Tahun 2018-2022.....	63
Gambar 3.2	IDG Kota Pekalongan dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional.....	63
Gambar 3.3	Perbandingan Pertumbuhan dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2023.....	90
Gambar 3.4	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 - 2023.....	102
Gambar 3.5	Proporsi PAD Dalam APBD Tahun 2023.....	124
Gambar 3.6	Proporsi Sumber Pendapatan Transfer Dalam APBD Kota Pekalongan Tahun 2023.....	125



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan paradigma baru telah memberikan perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada hakekatnya perubahan tersebut diarahkan untuk lebih menciptakan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan masyarakat baik melalui peningkatan daya saing daerah maupun peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Oleh karenanya, Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian visi dan misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah tahun 2023 dan LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance and clean governance*.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021–2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk



Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; penyusunan LKjIP Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKjIP Kota Pekalongan menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023 yaitu tahun ketiga RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021–2026.

## **1.2 GAMBARAN UMUM KOTA PEKALONGAN**

### **1.2.1 Kondisi Geografis**

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 60 50' 42" s,d, 6 55' 44" Lintang Selatan dan 1090 37' 55" s,d, 10942' 19" Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510,00 - 518,00 Km membujur dan 517,75 - 526,75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah:

Utara : Laut Jawa  
Timur : Kab. Batang  
Selatan : Kab. Pekalongan, Kab. Batang  
Barat : Kab. Pekalongan

Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 luas wilayah Kota Pekalongan adalah 45,25 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 luas wilayah Kota

Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 Km<sup>2</sup>. Perubahan ini dikarenakan adanya :

- a. Pemutakhiran garis pantai sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029;
- b. Pemutakhiran segmen batas wilayah administrasi;
- c. Perbaikan atas hasil kajian teknis dari pusat pemetaan batas wilayah pada Badan Informasi Geospasial terhadap perhitungan luas wilayah.

Dengan demikian maka luas wilayah Kota Pekalongan bertambah 1,16 Ha yang sebagian besar disebabkan oleh pemutakhiran garis pantai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

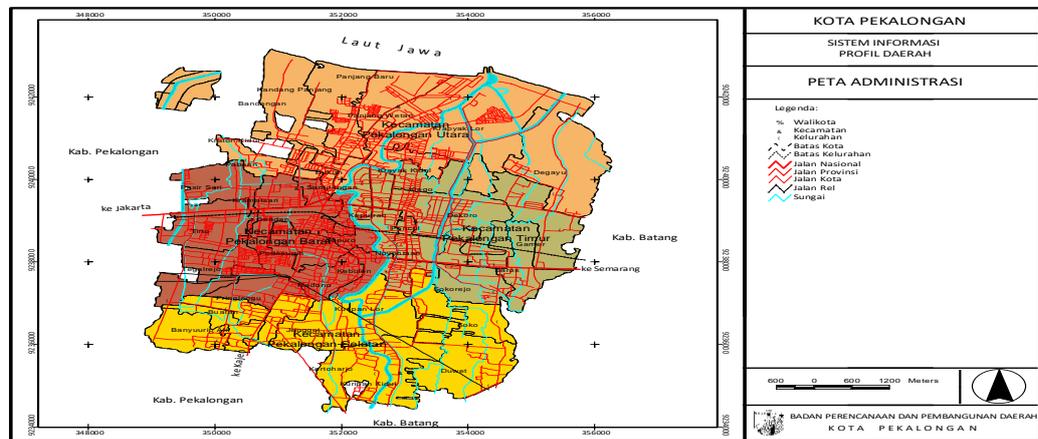
Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi : sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.

Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.1 Peta Administratif Kota Pekalongan



Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota ter konsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arah Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel 1.1. Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase Luas (persen)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	9,70	21,40
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,26	20,50
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	10,89	24,10
4	Kecamatan Pekalongan Utara	15,40	34
Total		45,25	100

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2023

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kalibaros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 15,40 Km<sup>2</sup> atau 34 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan.

### **1.2.2 Kondisi Demografis**

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan sebanyak 317.524 jiwa, terdiri dari 160.369 jiwa penduduk laki-laki dan 157.155 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan jenis kelamin penduduk, dapat dinyatakan jika rasio jenis kelamin di Kota Pekalongan tahun 2022 sebesar 102,00 yang berarti dalam 100 penduduk perempuan ada 102 penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, disajikan dalam tabel 1.2. berikut.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	12.977	12.425	25.402
5-9	12.338	11.800	24.138
10-14	12.525	11.785	24.310
15-19	12.751	11.848	24.599
20-24	13.040	12.236	25.276
25-29	13.178	12.219	25.397
30-34	13.452	12.128	25.580
35-39	13.032	12.067	25.099
40-44	12.373	11.932	24.305
45-49	11.134	11.224	22.358
50-54	9.405	10.038	19.443
55-59	8.255	8.897	17.152
60-64	6.578	7.108	13.686
65+	9.331	11.448	20.779
<b>Jumlah</b>	<b>160.369</b>	<b>157.155</b>	<b>317.524</b>

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2024

### 1.3 PERTUMBUHAN EKONOMI

Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2022, roda perekonomian pun mulai kembali bergerak. Hal ini ditunjukkan dengan laju perekonomian pada tahun 2023 sebesar 5,44 persen. Laju pertumbuhan tertinggi ada pada lapangan usaha transportasi dengan pertumbuhan 48,53 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum juga tumbuh cukup tinggi sebesar 12,43 persen dan jasa lainnya yang tumbuh sebesar 5,75 persen pada tahun 2022.



Ditinjau dari kontribusinya, lima besar lapangan usaha yang membentuk PDRB Kota Pekalongan pada tahun 2023 adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (21,05 persen), industri pengolahan (20,44 persen), konstruksi (15,64 persen), transportasi dan pergudangan (7,79 persen) dan jasa keuangan dan asuransi (5,93 persen).

Tabel 1.3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan, 2019–2023

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.66	5.10	4.79	4.71	4,48
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	20.85	21.40	21.15	20.79	20,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.16	0.16	0.15	0.14	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.10	0.12	1.12	0.11	0,11
F	Konstruksi	14.64	14.60	15.46	15.10	15,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.80	21.16	21.59	21.08	21,05
H	Transportasi dan Pergudangan	6.40	5.01	5.01	7.27	7,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.44	5.32	5.36	5.67	5,84
J	Informasi dan Komunikasi	4.36	5.15	5.07	4.74	4,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.13	6.22	6.22	6.14	5,93
L	Real Estat	2.71	2.74	2.66	2.58	2,54
M,N	Jasa Perusahaan	0.44	0.43	0.42	0.42	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.47	4.50	4.17	3.93	3,72
P	Jasa Pendidikan	4.65	4.73	4.54	4.16	4,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.29	1.44	1.40	1.32	1,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.90	1.91	1.83	1.82	1,80
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

\*Angka sementara

\*\*Angka sangat sementara

Sumber data : BPS Kota Pekalongan, 2023

Berdasarkan PDRB series tahun 2010 atas dasar harga konstan, nilai PDRB Kota Pekalongan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai PDRB tahun 2023 mencapai 8,476 miliar rupiah, meningkat dari 8.039 miliar rupiah pada tahun 2022. Namun di tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun

2022. Hal ini ditunjukkan oleh laju PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,44 %, lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 5,76 %.

Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen)

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.63	6.36	-3,21	3,41	-0,47
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	4.84	-0.48	2,38	4,26	2,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.72	-0.26	2,91	4,04	11,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.21	6.91	6,34	2,38	3,96
F	Konstruksi	4.71	-1.09	8,64	1,09	8,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.47	-4.68	5,46	3,29	5,13
H	Transportasi dan Pergudangan	7.53	-24.56	3,00	48,53	8,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.76	-3.78	4,78	12,43	13,08
J	Informasi dan Komunikasi	10.57	17.20	4,23	2,52	8,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.76	0.93	1,35	0,55	2,98
L	Real Estate	5.62	-0.08	1,89	4,89	6,27
M,N	Jasa Perusahaan	8.31	-4.32	2,22	5,32	7,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.82	-1.00	-0,85	1,20	2,10
P	Jasa Pendidikan	2.63	-0.56	0,50	0,28	5,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.84	8.35	1,76	2,35	4,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	8.47	-1.19	0,87	5,75	4,32
PDRB		5.50	-1.87	3,59	5,76	5,44

Sumber data : Kota Pekalongan Dalam Angka 2024

Sementara itu, Nilai PDRB Kota Pekalongan pada tahun 2023 ADHB mencapai Rp. 13.744 Milyar, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 12.599 Milyar. Nilai PDRB Kota Pekalongan ADHK mencapai Rp. 8.477 Milyar meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 8.039 Milyar. Nilai PDRB Kota Pekalongan sepanjang lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.5. Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekalongan

Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023
Atas Dasar Harga Berlaku	10.874	10.819	11.460	12.599	13,744
Atas Dasar Harga Konstan	7.477	7.338	7.601	8.039	8,477

Sumber data : BPS Kota Pekalongan 2023



#### **1.4 KONDISI PEMERINTAHAN**

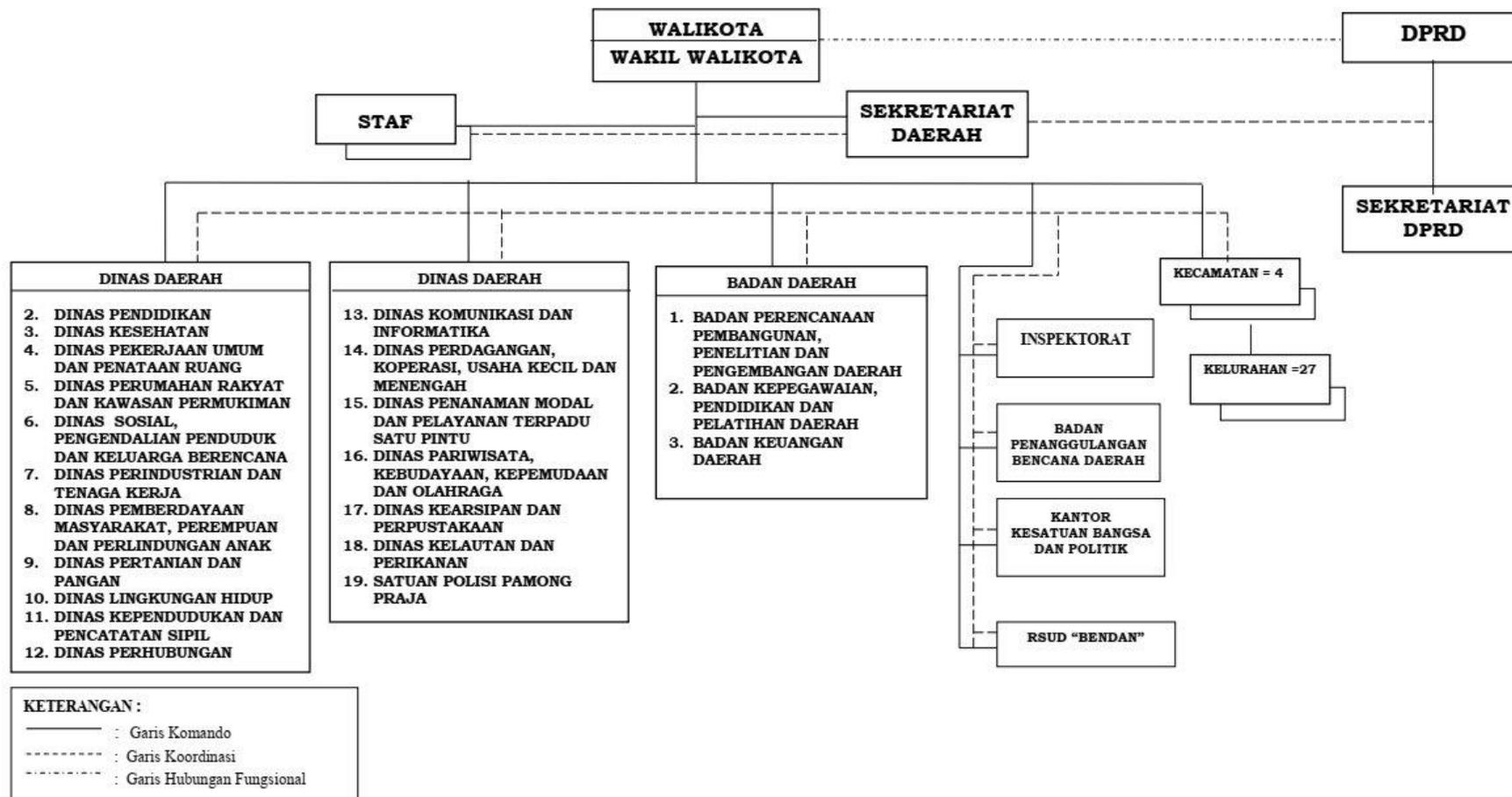
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 05 Tahun 2016 sebagai berikut :



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



## 1.5 KONDISI APARATUR

Dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), ASN (Aparatur Sipil Negara) menduduki peran yang sangat penting. Peran ASN dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi dengan level mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon II (Pemerintah Kab/Kota), serta mempertimbangkan tingkat pendidikan.

Pada tahun 2022, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak 3.261 orang, turun menjadi 3.179 orang di tahun 2023. Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin disajikan dalam tabel 1.6 berikut.

Tabel 1.6 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2023

Jabatan	2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	25	3	28	23	2	25
Eselon III	66	42	108	67	44	111
Eselon IV	124	107	231	130	110	240
Fungsional Umum	607	1080	1.687	444	314	758
Fungsional Tertentu	594	613	1.207	687	1358	2045
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.416</b>	<b>1.845</b>	<b>3.261</b>	<b>1.351</b>	<b>1.828</b>	<b>3.179</b>

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024

Sedangkan jumlah ASN menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin disajikan dalam tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.7 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD / Sederajat	33
2	SMP / Sederajat	336
3	SMA / Sederajat	77
4	Diploma I	4
5	Diploma II	12
6	Diploma III	453
7	Diploma IV	100
8	Sarjana / Strata I	1939
9	Pasca Sarjana / Strata II	221
10	Doktor / Strata III	4
<b>Jumlah Total</b>		<b>3.179</b>

Sumber : BKPSDM Kota Pekalongan 2024

## 1.6 ISU STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan No. 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023, isu strategis pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8 Isu Strategis Kota Pekalongan Tahun 2023

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan
Banjir dan rob yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
Masih adanya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan	
Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian indeks keluarga sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja	
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	
Belum optimalnya kapasitas SDM dan daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerah	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023, 2024

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan No. 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.

Dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali kota dan Wakil Wali kota dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

### 2.1.1. Visi Kota Pekalongan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021- 2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah :

**“MEWUJUDKAN KOTA PEKALONGAN YANG LEBIH SEJAHTERA,  
MANDIRI DAN RELIGIUS”**

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan Tahta Untuk Rakyat sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

**Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera**, Kota sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

**Lebih Mandiri,** Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan

Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

**Lebih Religius**, kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJP-D Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJP-D yaitu Mewujudkan kondisi peri kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua peri kehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlaq karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

### **2.1.2. Misi Kota Pekalongan**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut :

## **1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Untuk mencapai Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik dari aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan kecukupan tenaga kesehatan, ataupun kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan aktif dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, upaya mewujudkan visi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera juga dilakukan melalui pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari meningkatkan kualitas data sasaran yang terintegrasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sinkronisasi program dan kegiatan, baik dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendorong peran swasta dan masyarakat, baik yang tergabung secara kelembagaan ataupun

secara individu, untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Indeks Keluarga sehat dan Meningkatnya Penanganan Kemiskinan.

## **2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten, dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan**

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Misi ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi kedua ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompeten, dan produktif. Adapun sasaran misi ini adalah meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan, meningkatnya akses pendidikan, optimalnya pengarusutamaan gender, optimalnya

Pengarusutamaan Hak Anak, dan meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

### **3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman**

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, beribadah, ataupun mencari nafkah dan mata pencaharian.

Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak rob seperti sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, hampir seluruh Kecamatan Pekalongan Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Timur. Hampir sebagian besar mengalami permasalahan rumah yang tidak layak huni serta terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pengelolaan limbah ataupun jalan dan drainase lingkungan yang memadai.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggaran masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman, dengan sasaran Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

### **4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan**

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan, saat ini dihadapkan pada kondisi tanah yang terus mengalami penurunan atau *land subsidence*. Intensitas kejadian banjir dan rob akan semakin sering terjadi jika tidak dilakukan penanggulangan secara

komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob melalui sinergi sumber daya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga masyarakat.

Pembangunan – pembangunan pengendali banjir dan rob berskala besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus dibarengi dengan penataan sistem drainase kota dan kebijakan untuk menahan laju penurunan tanah oleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Adapun sasarannya yaitu Optimalnya penanganan banjir dan rob.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran meliputi : menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya tutupan hutan/RTH, dan Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Dasar, dengan sasaran meliputi : Optimalnya layanan air minum, Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan, dan Meningkatnya Layanan Transportasi Perkotaan.

## **5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal**

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi

ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

#### **6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah**

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Kota Pekalongan terdapat adat dan tradisi lainnya seperti Sya'banan (khol/ruwah), Syawalan, sedekah bumi, dan sedekah laut. Sya'banan (khol) adalah upacara keagamaan/kebudayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 14 sya'ban setahun sekali di selenggarakan di Makam Sapuro. Syawalan adalah upacara adat bagi umat Islam yang diselenggarakan di Kelurahan Krapyak dengan pemotongan lopis raksasa. Tradisi Sedekah Laut (Nyadran), yaitu upacara melarung sesaji berupa kepala kerbau dan jajan pasar lengkap serta tabur bunga yang dilaksanakan setiap bulan Syuro. Tradisi Pek-Chun yang hampir sama dengan tradisi sedekah laut, tradisi ini diselenggarakan oleh warga Tionghoa menurut kalender China pada perayaan tahun baru China atau Imlek.

Kota Pekalongan juga memiliki jenis kesenian yang beragam, antara lain Simtudh Duror dan Samproh, yaitu seni musik bernafaskan islam biasanya menyanyikan puji-pujian, shalawat dan lagu Islami. Jenis kesenian lainnya adalah Marawis, yaitu jenis "band tepuk" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Orkes Gambus dengan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah.

Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di atas, maka Pemerintah bersama Masyarakat Kota Pekalongan mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mewujudkan melalui upaya mendorong peningkatan intensitas event budaya yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat.

Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan. Adapun sarannya adalah manajemen atau pengelolaan potensi-potensi konflik sosial yang ada di masyarakat.

#### **7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government***

Misi ini bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

##### **2.1.3. Arah Kebijakan Umum**

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis, maka pembangunan Kota Pekalongan tahun 2022 mengusung tema "***Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi***

***Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang dan Jasa Unggulan***, dengan arah kebijakan :

1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit;
2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha;
3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas;
4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha;
5. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak;
6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan;
9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing;

10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya;
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah;
12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### 2.1.4. Tujuan dan Sasaran

*Tujuan* adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

*Sasaran* adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)
<b>Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat</b>			
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	1. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat
			Angka Kematian Ibu
			Angka Kematian Bayi (AKB)
			Angka Kematian Balita (AKABA)



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan		
		2. Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)
<b>Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan</b>			
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia		
		1. Meningkatnya akses pendidikan	Rata-rata lama sekolah
		2. Meningkatnya Pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan
		3. Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		4. Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak
<b>Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman</b>			
1. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen		
		1. Meningkatnya Kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh
<b>Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan</b>			
1. Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob		
		1. Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
		1. Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air
		2. Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan
	3. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	
3. Menjamin layanan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar		
		1. Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)
		2. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah
		3. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan ( <i>Level Of Service</i> ) Persentase keterhubungan jalan
<b>Misi 5 : Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal</b>			
1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita		Pertumbuhan ekonomi
		1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	
<b>Misi 6 : Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah</b>			
1. Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan		Persentase Penyelenggaraan Event Budaya
		1. Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial		Persentase pengelolaan potensi konflik sosial
		1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	
<b>Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government</b>			
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks SPBE
		1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( <i>Smart Governance</i> )	
		2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik ( <i>Smart Governance</i> )	IKM Kota Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota
		3. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit Sistem
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP Kota
		5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan ( <i>IKKOutcome</i> )
	6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Maturitas SPIP Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/ WBBM	

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2024



## **2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan No. 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.



**Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
		Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28	116,21	104,14	92,08	80,01	80,01
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21	7,91	7,60	7,30	7,00	7,00
		Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23	9,92	9,61	9,31	9,00	9,00
2	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,00	11,89
3	Meningkatnya akses pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	9,43	9,59	9,75	9,92	9,92
4	Meningkatnya Pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan Pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59	60,28	61,00	61,00



No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
7	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	70,54	70,81	71,08	71,34	71,34
8	Meningkatnya Kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SK Baru)	89,26	90,96	93,72	96,24	98,44	100,00	100,00
9	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1730,00	1537,00	1230,00	1027,00	909,00	790,00	565,00	565,00
10	Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39	35,39
11	Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61	23,61
12	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
13	Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
14	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	70,12	71,12	72,12	73,12	73,12
15	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayananjalan ( <i>Level Of Service</i> )	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
		Persentase keterhubunganjalan	persen	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86 - 1,97	2,28 - 2,84	2,48 - 2,83	2,53 - 3,32	4,55	4,55	4,55
17	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	91,11	93,33	97,78	100,00	100,00
18	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( <i>Smart Governance</i> )	Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25



No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
20	Meningkatnya kualitas Layanan Publik ( <i>Smart Governance</i> )	IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	83,64	83,79	83,94	84,09	84,09
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	91,00	93,00	95,00	96,00	97,00	97,20	97,50	97,50
21	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks MeritSistem	indeks	200,00	215,00	225,00	240,00	250,00	255,00	260,00	260,00
22	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,07
23	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan ( <i>IKK Outcome</i> )	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
		Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023  
Pemerintah Kota Pekalongan

No	Sasaran	Indikator	2023	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,30
		Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	116,21
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,91
		Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,92
2	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2,00
3	Meningkatnya akses pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	9,43
4	Meningkatnya Pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan Pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00
5	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59,14
6	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	kategori	Madya
7	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,54
8	Meningkatnya Kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	93,72



No	Sasaran	Indikator	2023	
			Satuan	Target
	kumuh			
9	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1.027,00
10	Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	indeks	35,36
11	Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60
12	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00
13	Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00
14	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	persen	70,12
15	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan ( <i>Level Of Service</i> )	kategori	B
		Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20
16	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	persen	2,48 - 2,83
17	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	91,11
18	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00
19	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( <i>Smart Governance</i> )	Indeks SPBE	indeks	2,95
20	Meningkatnya kualitas Layanan Publik ( <i>Smart Governance</i> )	IKM Kota	persen	83,64
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	96,00
21	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	indeks	240,00
22	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	skor	74,57
23	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK <i>Outcome</i> )	kategori	WTP
24	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Maturitas SPIP	nilai	3,40
		Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	5,00

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 maupun RKPD Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama RPJMD 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan No. 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.

### 3.1 PENGUKURAN KINERJA

#### *Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :*

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya  
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- Arahan Operasional  
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- Akuntabilitas  
Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- Perencanaan  
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- Pengelolaan  
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- Penganggaran  
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- Penyediaan pelayanan kepada pihak luar  
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang

didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

### **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN**

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

## **3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

### **3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pekalongan dan Indikator Tujuan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan No. 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
1	Meningkatnya indeks keluarga sehat	1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,30	0,35	116,67	Sangat berhasil
		2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	116,21	122,77	94,65	Sangat berhasil
		3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,91	13,71	57,70	Tidak Berhasil
		4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,92	18,42	53,87	Tidak Berhasil
2	Meningkatnya penanganan kemiskinan	1	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2,00	4,40	220	Sangat berhasil
3	Meningkatnya akses pendidikan	1	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,43	9,29	98,52	Sangat berhasil
4	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	Sangat berhasil
5	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59,14	Na	Na	Belum tersedia
6	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	1	Kategori Kota Layak Anak	kategori	2,00	3,00	150,00	Sangat berhasil
7	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,54	73,95	104,83	Sangat berhasil
8	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	1	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	93,72	95,09	101,46	Sangat berhasil
9	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	1	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1.027,00	880,83	116,59	Sangat berhasil
10	Menurunnya tingkat pencemaran air	1	Indeks Kualitas Air	indeks	35,36	48,86	138,18	Sangat berhasil
11	Optimalnya Kualitas Lahan	1	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	24,39	103,35	Sangat berhasil
12	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	1	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00	3,00	42,85	Sangat Tidak Berhasil
13	Optimalnya layanan air minum	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	Sangat berhasil
14	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	1	Persentase pelayanan sampah	persen	70,12	71,45	101,89	Sangat berhasil
15	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	1	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	4,00	4,00	100,00	Sangat berhasil
		2	Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	100,00	102,88	Sangat berhasil
16	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Pertumbuhan ekonomi	persen	2,48-2,83	5,44	192,22	Sangat berhasil



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
17	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	1 Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	91,11	111,11	121,95	Sangat berhasil
18	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	1 Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	Sangat berhasil
19	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( <i>Smart Governance</i> )	1 Indeks SPBE	indeks	2,95	3,29	111,53	Sangat berhasil
20	Meningkatnya kualitas Layanan Publik ( <i>Smart Governance</i> )	1 IKM Kota	persen	83,64	90,69	108,43	Sangat berhasil
		2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	96,00	96,62	100,65	Sangat berhasil
21	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1 Indeks Merit System	indeks	240,00	327,00	136,25	Sangat berhasil
22	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	1 Nilai SAKIP Kota	skor	74,57	72,83	97,67	Sangat berhasil
23	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	1 Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	WTP	Na	Na	Belum tersedia
24	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1 Maturitas SPIP	skor	3,40	3,002	88,29	Berhasil
		2 Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	5,00	3,00	60,00	Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 30 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 23 indikator (76,66%) dikategorikan "Sangat berhasil", 1 indikator (3,34%) dikategorikan "Berhasil", 3 indikator (10,00%) dikategorikan "Tidak Berhasil", 1 indikator (3,33%) dikategorikan "Sangat Tidak Berhasil", 2 indikator (6,66%) belum dapat dikategorikan karena data belum tersedia.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
1	Meningkatnya indeks keluarga sehat	1 Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,81	0,28	0,35	▲
		2 Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	188,23	124,53	122,77	▲
		3 Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,90	9,96	13,71	▼
		4 Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,27	12,28	18,42	▼
2	Meningkatnya penanganan kemiskinan	1 Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	1,00	1,42	4,40	▲
3	Meningkatnya akses pendidikan	1 Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,18	9,20	9,29	▲



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
4	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	1 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	●
5	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	57,87	61,37	Na	Belum tersedia
6	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	1 Kategori Kota Layak Anak	kategori	2,00	2,00	3,00	▲
7	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	75,77	70,35	73,95	▲
8	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	1 Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	Na	93,97	95,09	▲
9	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	1 Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1.730	980,14	880,83	▲
10	Menurunnya tingkat pencemaran air	1 Indeks Kualitas Air	indeks	13,29	45,33	48,86	▲
11	Optimalnya Kualitas Lahan	1 Indeks Kualitas Lahan	indeks	32,38	23,77	24,39	▲
12	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	1 Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	0	1,00	3,00	▲
13	Optimalnya layanan air minum	1 Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	Na	100,00	100,00	●
14	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	1 Persentase pelayanan sampah	persen	73,75	72,36	71,45	▲
15	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	1 Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	3,00	4,00	4,00	●
		2 Persentase keterhubungan jalan	persen	Na	100,00	100,00	●
16	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1 Pertumbuhan ekonomi	persen	3,59	5,76	5,44	▼
17	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	1 Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	86,67	95,56	111,11	▲
18	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	1 Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	●
19	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( <i>Smart Governance</i> )	1 Indeks SPBE	indeks	2,82	3,14	3,29	▲
20	Meningkatnya kualitas Layanan Publik ( <i>Smart Governance</i> )	1 IKM Kota	persen	80,83	90,44	90,69	▲
		2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	Na	90,01	96,62	▲



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
21	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1 Indeks Merit System	indeks	Na	264,50	327,00	▲
22	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	1 Nilai SAKIP Kota	skor	73,16	73,31	72,83	▼
23	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	1 Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	WTP	WTP	Na	Belum tersedia
24	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1 Maturitas SPIP	skor	3,00	3,022	3,002	▼
		2 Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2,00	2,00	3,00	▲

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir RPJMD 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya indeks keluarga sehat	1 Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,35	0,50	70	Cukup berhasil
		2 Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	122,77	80,01	62,24	Tidak Berhasil
		3 Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	13,71	7,00	51,06	Tidak Berhasil
		4 Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	18,42	9,00	48,86	Sangat Tidak Berhasil
2	Meningkatnya penanganan kemiskinan	1 Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	4,40	3,00	146,67	Sangat berhasil
3	Meningkatnya akses pendidikan	1 Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,29	9,92	93,65	Sangat berhasil
4	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	1 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	Sangat berhasil
5	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	Na	61,00	Na	Belum tersedia
6	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	1 Kategori Kota Layak Anak	kategori	3,00	2,00	150,00	Sangat berhasil
7	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	73,95	71,34	103,66	Sangat berhasil
8	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	1 Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	95,09	100,00	95,09	Sangat berhasil
9	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	1 Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	880,83	565,00	64,18	Tidak Berhasil



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)	Kategori
10	Menurunnya tingkat pencemaran air	1 Indeks Kualitas Air	indeks	48,86	35,39	138,06	Sangat berhasil
11	Optimalnya Kualitas Lahan	1 Indeks Kualitas Lahan	indeks	24,39	23,61	103,30	Sangat berhasil
12	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	1 Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	3,00	7,00	42,85	Sangat Tidak Berhasil
13	Optimalnya layanan air minum	1 Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	Sangat berhasil
14	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	1 Persentase pelayanan sampah	persen	73,09	71,45	97,75	Sangat berhasil
15	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	1 Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	4,00	4,00	100,00	Sangat berhasil
		2 Persentase keterhubungan jalan	persen	100,00	100,00	100,00	Sangat berhasil
16	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1 Pertumbuhan ekonomi	persen	5,44	4,55	119,56	Sangat berhasil
17	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	1 Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	111,11	100,00	111,11	Sangat berhasil
18	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	1 Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	Sangat berhasil
19	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( <i>Smart Governance</i> )	1 Indeks SPBE	indeks	3,29	3,25	101,23	Sangat berhasil
20	Meningkatnya kualitas Layanan Publik ( <i>Smart Governance</i> )	1 IKM Kota	persen	90,69	84,09	107,85	Sangat berhasil
		2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	96,62	97,50	99,09	Sangat berhasil
21	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1 Indeks Merit System	indeks	327,00	260,00	125,77	Sangat berhasil
22	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	1 Nilai SAKIP Kota	skor	72,83	76,07	95,74	Sangat berhasil
23	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	1 Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	Na	WTP	Na	Belum tersedia
24	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1 Maturitas SPIP	skor	3,00	4,00	75,00	Cukup berhasil
		2 Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	3,00	8,00	37,50	Sangat Tidak Berhasil



### 3.2.2. Capaian Kinerja Sasaran

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta kesimpulan rata-rata, maka dari 24 sasaran strategis dengan 30 indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.5 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2023

No	Sasaran	Jumlah indikator	Rata-rata	Kategori	Rincian kategori untuk indikator (Nilai Mean)					
					Belum diketahui (0)	Sangat tidak berhasil (25)	Tidak berhasil (57.5)	Cukup berhasil (70)	Berhasil (82.5)	Sangat berhasil (95)
1	Meningkatnya indeks keluarga sehat	4	76,25	Cukup berhasil			2			2
2	Meningkatnya penanganan kemiskinan	1	95	Sangat berhasil						1
3	Meningkatnya akses pendidikan	1	95	Sangat berhasil						1
4	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	1	95	Sangat berhasil						1
5	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	1	0	Belum tersedia	1					1
6	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	1	95	Sangat berhasil						1
7	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	1	95	Sangat berhasil						1
8	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	1	95	Sangat berhasil						1
9	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	1	95	Sangat berhasil						1
10	Menurunnya tingkat pencemaran air	1	95	Sangat berhasil						1
11	Optimalnya Kualitas Lahan	1	95	Sangat berhasil						1
12	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	1	25	Sangat Tidak Berhasil		1				
13	Optimalnya layanan air minum	1	95	Sangat berhasil						1
14	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	1	95	Sangat berhasil						1
15	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	2	95	Sangat berhasil						2
16	Meningkatnya pertumbuhan	1	95	Sangat berhasil						1



No	Sasaran	Jumlah indikator	Rata-rata	Kategori	Rincian kategori untuk indikator (Nilai Mean)					
					Belum di ketahui (0)	Sangat tidak berhasil (25)	Tidak berhasil (57.5)	Cukup berhasil (70)	Berhasil (82.5)	Sangat berhasil (95)
	ekonomi									
17	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	1	95	Sangat berhasil						1
18	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	1	95	Sangat berhasil						1
19	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( <i>Smart Governance</i> )	1	95	Sangat berhasil						1
20	Meningkatnya kualitas Layanan Publik ( <i>Smart Governance</i> )	2	95	Sangat berhasil						2
21	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1	95	Sangat berhasil						1
22	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	1	95	Sangat berhasil						1
23	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	1	0	Belum tersedia	1					
24	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	2	70	Cukup berhasil			1		1	

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar **"89,83"** dengan kategori **"Berhasil"**. Dari 24 capaian sasaran strategis, sebanyak 19 sasaran (79,16%) dengan kategori "Sangat Berhasil", 2 sasaran (8,33%) dengan kategori "Cukup Berhasil", 1 sasaran (4,16%) dengan kategori "Sangat Tidak Berhasil", 2 sasaran (4,16%) belum dapat dikategorikan karena data belum tersedia.

### 3.2.3. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan yaitu :

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Usia Harapan Hidup	tahun	74,52	74,60	100,11	Sangat berhasil
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1 Angka Kemiskinan	persen	6,50	6,81	95,45	Sangat berhasil
3	Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	1 Indeks Pembangunan Manusia	indeks	75,52	76,71	101,58	Sangat berhasil
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,48	5,02	129,08	Sangat berhasil
4	Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	1 Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	persen	74,07	70,37	95,01	Sangat berhasil
5	Menurunkan luas genangan banjir dan rob	1 Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	persen	22,12	18,98	116,57	Sangat berhasil
6	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	50,87	56,24	110,56	Sangat berhasil
7	Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar	1 Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	persen	89,11	90,48	101,54	Sangat berhasil
8	Menumbuhkan tingkat Perekonomian masyarakat	1 PDRB perkapita	persen	36,92	43,29	117,25	Sangat berhasil
9	Melestarikan seni budaya	1 Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	100,00	100,00	100,00	Sangat berhasil
10	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	1 Jumlah konflik sosial	kasus	0,00	0,00	100,00	Sangat berhasil
11	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	72,69	77,12	106,09	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 12 indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa 12 indikator (100%) dikategorikan "Sangat berhasil".

### 3.2.4. Persentase Capaian Kinerja Menurut Misi

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja sasaran menurut misi dari 42 indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Persentase Kategori Capaian Indikator Kinerja Menurut Misi

No	MISI / Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
1	MISI 1	5	
	Sangat Berhasil	3	60 %



No	MISI / Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
	Berhasil		
	Cukup Berhasil		
	Tidak Berhasil	2	40 %
	Sangat Tidak Berhasil		
	Belum diketahui		
<b>2</b>	<b>MISI 2</b>	<b>4</b>	
	Sangat Berhasil	3	75 %
	Berhasil		
	Cukup Berhasil		
	Tidak Berhasil		
	Sangat Tidak Berhasil		
	Belum diketahui	1	25 %
<b>3</b>	<b>MISI 3</b>	<b>1</b>	
	Sangat Berhasil	1	100 %
	Berhasil		
	Cukup Berhasil		
	Tidak Berhasil		
	Sangat Tidak Berhasil		
	Belum diketahui		
<b>4</b>	<b>MISI 4</b>	<b>9</b>	
	Sangat Berhasil	8	88,89 %
	Berhasil		
	Cukup Berhasil		
	Tidak Berhasil		
	Sangat Tidak Berhasil	1	11,11 %
	Belum diketahui		
<b>5</b>	<b>MISI 5</b>	<b>1</b>	
	Sangat Berhasil	1	100%
	Berhasil		
	Cukup Berhasil		
	Tidak Berhasil		
	Sangat Tidak Berhasil		
	Belum diketahui		
<b>6</b>	<b>MISI 6</b>	<b>2</b>	
	Sangat Berhasil	2	100 %
	Berhasil		
	Cukup Berhasil		
	Tidak Berhasil		
	Sangat Tidak Berhasil		
	Belum diketahui		
<b>7</b>	<b>MISI 7</b>	<b>8</b>	
	Sangat Berhasil	5	62,5 %
	Berhasil	1	12,5 %
	Cukup Berhasil		
	Tidak Berhasil	1	12,5 %
	Sangat Tidak Berhasil		
	Belum diketahui	1	12,5 %

### 3.2.5. Analisis Capaian Kinerja

#### SASARAN 1 : Meningkatnya indeks keluarga sehat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 76,25 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Cukup Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Keluarga Sehat	0,18	indeks	0,18	0,28	0,30	0,35	116,67	0,50
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	188,23	per 100.000 KH	188,23	124,53	116,21	122,77	94,65	80,01
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,90	per 1.000 KH	8,90	9,96	7,91	13,71	57,70	7,00
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	10,27	per 1.000 KH	10,27	12,28	9,92	18,42	53,87	9,00

#### 1. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas (12) indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8. Indeks keluarga sehat Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar 0,33 melebihi target RPJMD yang telah ditetapkan, serta lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.9 Perbandingan Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan dengan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

No	Daerah	Indeks
1	Nasional	0,26
2	Jawa Tengah	0,3
3	Kota Semarang	0,84
4	Kota Surakarta	0,63
5	Kudus	0,61
6	Kota Tegal	0,47
7	Kota Salatiga	0,44
8	Jepara	0,44
9	Purbalingga	0,44
10	Kendal	0,38
11	Pati	0,38

12	Kota Magelang	0,38
13	Demak	0,37
14	Rembang	0,36
<b>15</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>0,35</b>
16	Sukoharjo	0,34
17	Klaten	0,29
18	Karanganyar	0,29
19	Sragen	0,28
20	Grobogan	0,28

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah, Kota Pekalongan berada pada posisi 15 Indeks Keluarga Sehat dari 35 Kabupaten/Kota.

Faktor – faktor yang mendukung tercapainya target Indeks Keluarga Sehat :

- a. Updating data Keluarga Sehat secara berkala;
- b. Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan;
- c. Adanya target kunjungan rumah;
- d. Kolaborasi antar program yang berjalan dengan baik.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	26.000.000	26.000.000	23.595.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	72.090.000	72.090.000	71.295.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.830.000	8.830.000	8.830.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.380.000	15.380.000	15.380.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	41.305.000	41.305.000	39.427.500



		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.003.025.000	1.989.974.000	1.969.674.475
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.069.693.000	25.419.518.000	25.407.282.577
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	720.000.000	120.000.000	116.930.900
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	110.000.000	160.000.000	158.896.740
<b>Jumlah</b>			<b>24.066.323.000</b>	<b>27.853.097.000</b>	<b>27.811.312.192</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,85%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 116,67%. maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 16,85% pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut :

- a. Tersedianya anggaran yang cukup memadai untuk pelaksanaan program yang mendukung IKS
- b. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan seluruh masyarakat dalam mendukung program IKS

## 2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya Angka Kematian Ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

Tabel 3.10 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Kasus Kematian	Jumlah Kelahiran	AKI per 100.000 KH
2021	11	5844	188,23
2022	7	5651	123,87
2023	6	4887	122,77

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Kondisi Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Pekalongan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 AKI sebesar 188,23 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 11 kasus menurun menjadi 123,87 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 7 kasus di tahun 2022. AKI tahun 2023 turun menjadi 122,77 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 6 kasus.

Tabel 3.11 Perbandingan Angka Kematian Ibu Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Daerah	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
1	Provinsi Jawa Tengah	88,1
2	Pemerintah Kota Pekalongan	122,77

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Pekalongan berhasil menurunkan jumlah kasus kematian ibu menjadi 122,77 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 6 kasus. Adapun penyebab langsung kematian Ibu di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan karena kasus perdarahan, infeksi, eklamsia dan penyebab lain.

Faktor – faktor penghambat tercapainya target Angka Kematian Ibu :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya skrining resiko kehamilan
- b. Keterlambatan keluarga dalam pengambilan keputusan utk sampai ketempat pelayanan kesehatan
- c. Belum optimalnya peran lintas sektor/masyarakat dlm melakukan pendampingan pada ibu hamil resiko tinggi yang memerlukan tatalaksana rujukan
- d. Tingginya kasus ibu hamil dengan faktor resiko sehingga meningkatkan

tingginya komplikasi kebidanan

- e. Kurangnya pengetahuan ibu akan bahaya & resiko kehamilan
- f. Belum optimalnya peran suami siaga

Upaya yang dilakukan guna menurunkan Angka Kematian Ibu :

- a. Fasilitasi pembiayaan pemeriksaan kehamilan & persalinan dengan UHC
- b. Peningkatan kualitas ANC terpadu
- c. Pemeriksaan dan skrining penyakit penyerta pada ibu hamil
- d. Peningkatan SDM kesehatan melalui OJT gawat darurat maternal neonatal di Rumah Sakit
- e. Skrining/deteksi resiko kehamilan dan tatalaksananya oleh dokter Spesialis kebidanan di wilayah kecamatan/puskesmas

Pertemuan lintas sektor dan jejaring dalam percepatan penurunan angka kematian ibu

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	125.000.000	124.370.350

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,50 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 94,65 %. maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

### 3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal, yang merupakan masalah yang kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan congenital. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan beberapa faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan,

seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan, dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Tabel 3.12 Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Pekalongan Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Kasus Kematian	Jumlah Kelahiran	AKB per 1.000 KH
2021	52	5844	8,9
2022	56	5651	9,91
2023	67	4887	13,71

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Angka Kematian Bayi dari tahun 2021 sampai 2023 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi pada tahun 2021 adalah 8,9 dengan jumlah kasus kematian sejumlah 52 kasus. Sedangkan pada tahun 2022, Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan menjadi 9,91 per 1.000 KH dengan jumlah kasus kematian sejumlah 56 kasus. Dan di tahun 2023 Angka Kematian Bayi sebesar 13,71 dengan jumlah kasus kematian sebanyak 67 kasus.

Tabel 3.13 Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Pekalongan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Daerah	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH
1	Provinsi Jawa Tengah	9,2
2	Pemerintah Kota Pekalongan	13,71

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, kelainan kongenital, kelainan saluran pencernaan, pnemonia, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.

Faktor – faktor penghambat tercapainya target Angka Kematian Bayi :

- a. Masih tingginya ibu hamil dan ibu bersalin dengan resiko tinggi
- b. Masih tingginya bayi dengan resiko tinggi
- c. Masih adanya mitos di masyarakat yang tidak sesuai bagi kesehatan bayi
- d. Belum optimalnya sistem rujukan yang ada
- e. Kurang optimalnya tatalaksana petugas dalam menangani bayi beresiko

- f. Keterlambatan keluarga dalam pengambilan keputusan untuk dilakukan tatalaksana/rujukan ke FKL
- g. Masih kurangnya pemahaman keluarga tentang tanda bahaya BBL
- h. Kondisi ekonomi/kemiskinan sehingga keluarga tidak dapat melakukan perawatan kesehatan/pemenuhan gizi secara optimal
- i. Masih kurangnya pemenuhan fasilitas rujukan yang lengkap di FKTL
- j. Masih kurangnya alat penunjang kesehatan yang dibutuhkan di FKTL bagi tata laksana bayi beresiko

Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi :

- a. Deteksi resiko pada ibu hamil dan ibu bersalin
- b. Deteksi resiko pada bayi
- c. Optimalisasi sistem rujukan
- d. Edukasi tentang tanda bahaya bayi berisiko tinggi
- e. Peningkatan kapasitas petugas dalam menangani bayi berisiko
- f. Fasilitasi jaminan pembiayaan UHC bagi BBL berisiko/sunting
- g. Pemenuhan sarana penunjang tatalaksana BBL di Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
- h. Peningkatan kualitas ANC terpadu
- i. Penguatan lintas sektor/jejaring dalam skrining dan deteksi bayi, balita dengan risiko tinggi

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.000.000	26.000.000	23.595.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 90,75%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 57,70%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

#### 4. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita dan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.

Tabel 3.14 Kasus Kematian Balita dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Kasus Kematian	Jumlah Kelahiran	AKABA per 1.000 KH
2021	60	5844	10,27
2022	69	5651	12,21
2023	90	4887	18,42

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Capaian AKABA dalam kurun waktu tahun 2021-2023 cenderung meningkat. AKABA dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat dari 10,27 per 1.000 KH pada tahun 2021 dengan 60 kasus kematian menjadi 12,21 per 1.000 KH pada tahun 2022 dengan 69 kasus kematian. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 18,42 per 1.000 KH dengan jumlah kasus kematian sebanyak 90.

Tabel 3.15 Perbandingan Angka Kematian Balita (AKABA) Kota Pekalongan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Daerah	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 KH
1	Provinsi Jawa Tengah	10,7
2	Pemerintah Kota Pekalongan	18,42

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh adanya penyakit penyerta pada Balita seperti ISPA, Diare, DBD, Campak ataupun kombinasi dari penyakit menular lainnya serta kurangnya pemahaman orang tua tentang deteksi dini balita sakit.

Tantangan/hambatan pada capaian Angka Kematian Balita (AKABA) :

- a. Masih tingginya balita dengan resiko tinggi

- b. Masih tingginya kasus stunting dan permasalahan gizi lainnya, baik gizi kurang maupun gizi buruk
- c. Adanya mitos di masyarakat yang kurang mendukung bagi kesehatan  
Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi :
  - a. Kegiatan deteksi resiko pada balita melalui saber AKB
  - b. Optimalisasi posyandu dalam skrining awal kesehatan balita
  - c. Edukasi ke masyarakat tentang pentingnya gizi bagi kesehatan balita
  - d. Edukasi ke masyarakat tentang tanda bahaya bagi balita
  - e. Fasilitasi jaminan pembiayaan UHC bagi BBL beresiko/stunting
  - f. Pemenuhan sarana penunjang tatalaksana BBL di poned
  - g. Peningkatan kualitas ANC terpadu
  - h. Penguatan lintas sektor/jejaring dalam skrining dan deteksi bayi, balita risiko tinggi

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN (SUB KEGIATAN)	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.090.000	72.090.000	71.295.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,9%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 53,87 %, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

## **SASARAN 2 : Meningkatnya penanganan kemiskinan**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.16 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	1,00	%	1,00	1,42	2,00	4,40	220,16	3,00

Indikator Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS) merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS) adalah penurunan warga miskin berdasarkan penurunan dari data DTKS tahun sebelumnya dengan tahun N. Sedangkan DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang databasenya di Kementerian Sosial. Data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Pada tahun 2023, Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS) Kota Pekalongan sebesar 4,40 % dan mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan.

Hal ini didukung oleh faktor-faktor dibawah ini:

1. Salah satu anggota keluarga telah diangkat sebagai ASN dan terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan, sehingga KK tersebut dikeluarkan dari data DTKS;
2. Salah satu anggota keluarga mendapatkan pekerjaan pada sektor swasta dengan penghasilan diatas UMP dan terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan sehingga KK tersebut dikeluarkan dari DTKS dan dikatagorikan bukan keluarga miskin;
3. Kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah dan sektor swasta dalam penanganan kemiskinan di Kota Pekalongan melalui pendanaan TJSLBU ( Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha )

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	155.756.000	169.406.000	164.847.198
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	331.315.000	364.395.000	274.886.904

Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.130.503.000	1.164.010.000	1.123.896.169
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	470.552.000	438.410.000	414.856.107
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.679.031.000	1.614.996.000	1.520.067.704
Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.720.089.000	1.720.304.000	1.491.352.312
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	545.187.000	92.382.000	83.758.383
<b>Total</b>		<b>6.032.433.000</b>	<b>5.563.903.000</b>	<b>5.073.664.777</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 91,19 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 220,16 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 141,43 % pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Program penanganan kemiskinan oleh Pemerintah pada tahun 2023 menjadi prioritas utama;
2. Kepedulian seluruh stakeholder meliputi akademisi, pihak swasta dan pihak lain dalam penanganan kemiskinan;
3. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan seluruh masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.

### **SASARAN 3 : Meningkatnya akses pendidikan**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.17 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Rata-Rata Lama Sekolah	8,96	tahun	9,18	9,20	9,43	9,29	98,52	9,92

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh

penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Rata-rata lama sekolah Kota Pekalongan tahun 2023 adalah sebesar 9,29 tahun. Capaian tersebut telah memenuhi target yaitu sebesar 9,27, capaian rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 8,96, tahun 2021 sebesar 9,18 serta tahun 2022 sebesar 9,20.

Tabel 3.18 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No	Daerah	Rata-rata Lama Sekolah
1	Nasional	8,77
2	Provinsi Jawa Tengah	8,01
3	Kota Pekalongan	9,29
4	Kabupaten Batang	7,07
5	Kabupaten Pekalongan	7,47
6	Kota Tegal	9,24

Sumber data : Badan Pusat Statistik Nasional dan Jawa Tengah, 2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian rata-rata lama sekolah Kota Pekalongan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota sekitar, Provinsi maupun Nasional. Sesuai rilis data rata-rata lama sekolah tahun 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah Kota Pekalongan sebesar 9,29, Kabupaten Batang sebesar 7,07, Kabupaten Pekalongan sebesar 7,47, Kota Tegal sebesar 9,24, Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,01, dan Nasional sebesar 8,77. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bidang Pendidikan di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan dan kondisinya relatif lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota sekitar.

Faktor pendukung keberhasilan pada sasaran ini sebagai berikut :

1. Dilakukan sosialisasi pada berbagai macam kebijakan maupun program pemerintah yang berkaitan dengan upaya menumbuhkan minat dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan formal

maupun non formal;

2. Peningkatan akses layanan pendidikan berupa kemudahan menjangkau lokasi sekolah dan biaya pendidikan oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Peningkatan mutu layanan pendidikan berupa pemenuhan sarana prasarana maupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang layak serta memenuhi standar nasional pendidikan.

Tantangan/ hambatan dalam mencapai sasaran ini adalah masih banyaknya penduduk usia muda di Pekalongan yang cenderung lebih memilih bekerja daripada harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Lebih mengintensifkan sosialisasi maupun publikasi seputar informasi pendidikan di Kota Pekalongan serta memberikan insentif dan keringanan/ pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk terus bersekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam hal mengakses data maupun informasi seputar jenjang pendidikan menengah sehingga akan memudahkan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam menentukan jenis kontribusi yang tepat guna dan tepat sasaran bagi peningkatan partisipasi pendidikan menengah di Kota Pekalongan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	26.954.898.000	27.522.121.000	27.208.496.540
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.390.054.000	20.403.857.000	20.307.830.972
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.578.027.000	9.629.788.000	9.586.817.982
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.631.546.000	4.576.100.000	4.537.470.446
<b>Total</b>		<b>61.554.525.000</b>	<b>62.131.866.000</b>	<b>61.640.615.940</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,21 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 98,52 %, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

#### **SASARAN 4 : Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.19 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100	persen	100	100	100	100	100	100

Indikator Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi**.

Pendidikan karakter dan keagamaan di Kota Pekalongan telah diimplementasikan di seluruh jenjang mulai Usia Dini sampai dengan Pendidikan Dasar (PAUD, SD, SMP, dan pusat kegiatan belajar masyarakat). Jumlah seluruh sekolah yang telah mengimplementasikan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan adalah 489 sekolah.

Faktor pendukung keberhasilan realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan anggaran yang memadai dalam pembangunan Pendidikan karakter siswa dari jenjang anak usia dini sampai dengan Pendidikan dasar;
2. Adanya program dan kegiatan yang tepat sasaran dalam pengembangan dan pembinaan Pendidikan karakter, seperti pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar dan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	148.044.000	108.044.000	106.931.000
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	90.000.000	90.000.000	88.807.900
<b>Total</b>		<b>238.044.000</b>	<b>198.044.000</b>	<b>195.738.900</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,84 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,17 % pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan pencapaian rata – rata lama sekolah;
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder.

### **SASARAN 5 : Optimalnya Pengarusutamaan Gender**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 5 dengan 1 indikator kinerja belum dapat diketahui karena data belum dirilis. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

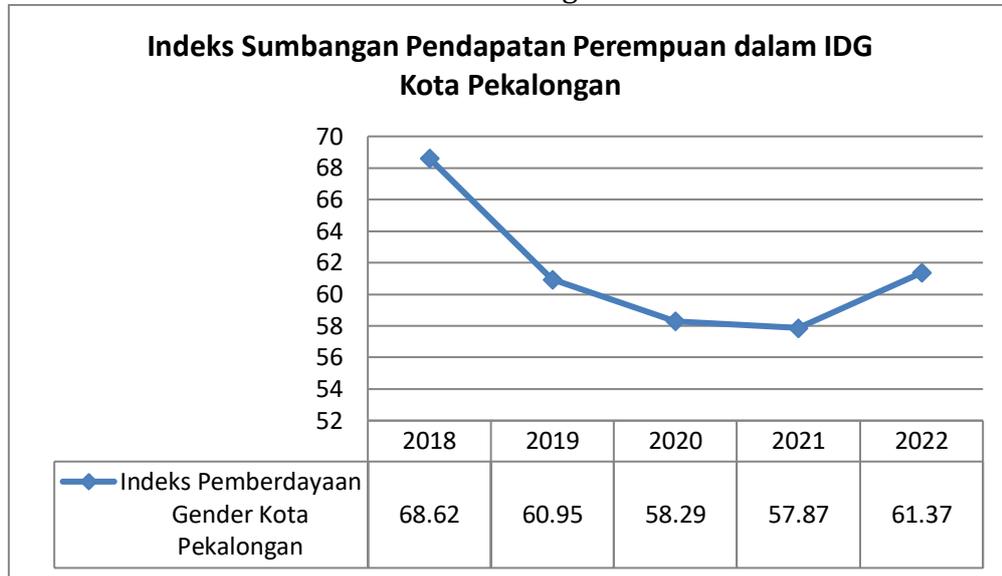
Tabel 3.20 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,29	indeks	57,87	61.37	58.78	Na	Na	61.00

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diukur berdasarkan angka Indeks Pemberdayaan Gender IDG yang dikeluarkan BPS. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan tahun 2023 menunggu rilis dari BPS (diperkirakan akan rilis pada bulan April 2024). Selama periode tahun 2018 sampai dengan 2021, nilai IDG Kota Pekalongan cenderung mengalami penurunan, namun di tahun 2022 nilai

IDG Kota Pekalongan meningkat naik 3.5, sebagaimana tabel berikut :

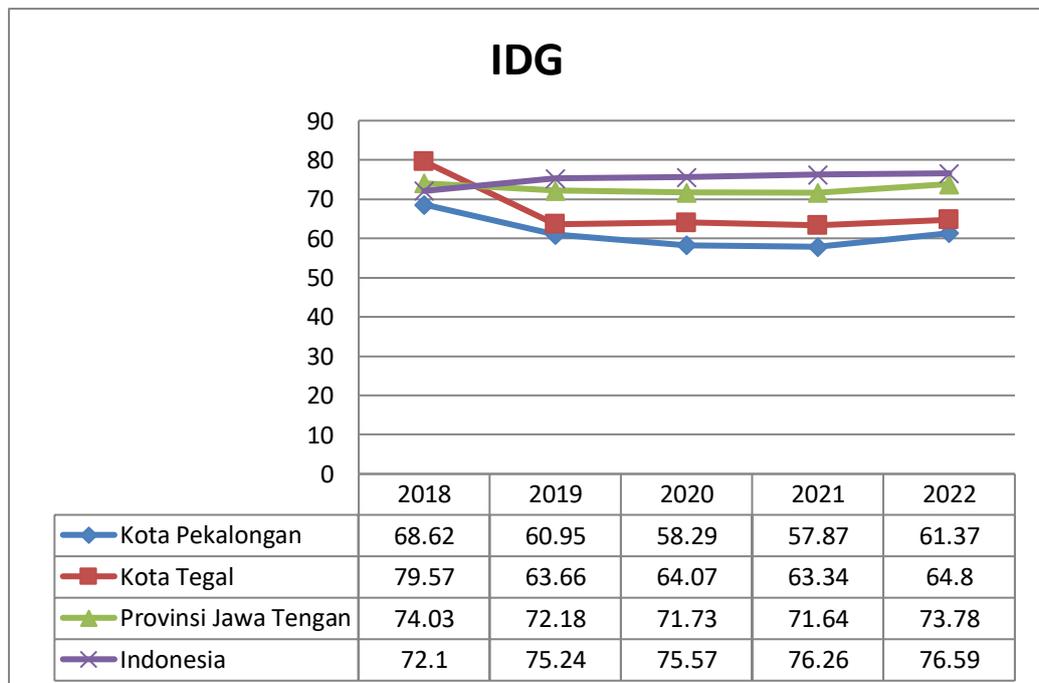
Gambar 3.1 IDG Kota Pekalongan Tahun 2018-2022



Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2023

IDG Kota Pekalongan, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional masih di bawah rata-rata, dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut :

Gambar 3.2 IDG Kota Pekalongan dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional



Sumber data : Badan Pusat Statistik Nasional dan Jawa Tengah, 2023

Faktor pendukung tercapainya target Indeks Pemberdayaan Gender sebagai berikut :

1. Dukungan dari Pemimpin Daerah, DPRD, dan Ketua TP PKK Kota Pekalongan dalam upaya optimalisasi pengarusutamaan gender;
2. Potensi masyarakat untuk menjadi bagian dalam upaya peningkatan IDG cukup besar khususnya dari sisi SDM ( lembaga/ organisasi kemasyarakatan, RT/RW, organisasi perempuan, Forum Anak, Karang Taruna, PKK, LPM, BKM, Lebe, dan dunia usaha);
3. Sinergitas dan kolaborasi antar lembaga dan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan cukup baik dalam mensinergikan program optimalisasi pengarusutamaan gender.

Tantangan/hambatan dalam capaian Indeks Pemberdayaan Gender :

1. Budaya patriarki cukup besar di Kota Pekalongan sehingga untuk membangun paradigma responsif gender membutuhkan usaha yang intens dan membutuhkan waktu;
2. Masih terdapat tokoh agama/ tokoh masyarakat yang belum sejalan dengan upaya optimalisasi pengarusutamaan gender.

Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh upaya/strategi:

1. Optimalisasi Pengarusutamaan Gender lebih masih melalui advokasi PUG dengan sasaran yang lebih luas khususnya tokoh agama/ tokoh masyarakat;
2. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender menjadi salah satu upaya untuk optimalisasi pengarusutamaan gender;
3. Meningkatkan sinergitas dan optimalisasi peran OPD terkait dalam upaya peningkatan sumbangan pendapatan perempuan yang menjadi salah satu indikator komposit IDG dan mejadi target kinerja.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengarusutamaan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender	17.034.000	16.634.000	16.612.000



Gender dan Pemberdayaan Perempuan	(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000	139.600.000	135.825.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	2.400.000	2.400.000
Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	275.00.000	27.100.000	27.005.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	101.602.000	101.202.000	77.732.424
<b>Total</b>		<b>301.136.000</b>	<b>286.936.000</b>	<b>259.574.424</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 90,46 %. Efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dihitung karena capaian kinerja belum diketahui.

### SASARAN 6 : Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 6 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.21 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Kategori Kota Layak Anak	Madya	kategori	2,00	2,00	2,00	3,00	150,00	2,00

Kategori Kota Layak Anak adalah indikator yang diukur berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI tentang Kota Layak Anak. Capaian kinerja Indikator Kategori Kota Layak Anak Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah Nindya.

Tahun 2023, Kota Pekalongan dalam mewujudkan Kota Layak Anak telah diapresiasi oleh Kementerian PPPA RI berupa penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Nindya meningkat dari tahun sebelumnya dengan kategori Madya. Peningkatan kategori dari Madya ke Nindya tidak terlepas dari komitmen

bersama Walikota Pekalongan dengan OPD terkait dan stakeholder dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai Kota Layak Anak.

Tabel 3.22 Perbandingan Kategori Kota Layak Anak dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Daerah	Kategori
1.	Kabupaten Brebes	Nindya
2.	Kabupaten Batang	Madya
3.	Kabupaten Pemasang	Nindya
4.	Kabupaten Tegal	Nindya
5.	Kota Tegal	Nindya
6.	Kota Pekalongan	Madya

Sumber data : Berita Daerah Online, 2024

Faktor pendukung tercapainya sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Dukungan dari Pemimpin Daerah ( Walikota dan Wakil Walikota), DPRD , Ketua TP PKK Kota Pekalongan dalam upaya optimalisasi pengarusutamaan Hak Anak di Kota Pekalongan;
2. Potensi masyarakat untuk mewujudkan Kota Pekalongan Menuju Layak Anak cukup besar khususnya dari unsur sekolah dan masyarakat;
3. Kolaborasi dan sinergi lembaga/ instansi terkait dalam upaya mewujudkan kota layak anak di klaster KLA cukup baik.

Tantangan/hambatan dalam capaian Kategori Kota Layak Anak :

1. Indikator-indikator di tiap kluster kota layak anak harus sudah terstandarisasi;
2. Adanya perubahan sumber daya manusia baik dikarenakan mutasi atau pergantian personil tim kota layak anak.

Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh upaya/strategi:

1. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi kegiatan antar OPD dan stakeholder;
2. Mengoptimalkan gugus tugas kota layak anak.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	132.201.000	105.495.000	93.690.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	296.784.000	254.817.000	218.075.600
Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	52.783.000	31.246.000	29.410.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.030.000	22.030.000	21.069.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.760.000	25.000.000	25.000.000
<b>Total</b>		<b>511.558.000</b>	<b>438.588.000</b>	<b>387.244.600</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 88,29 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 150,00 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 69,89 % pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Adanya kolaborasi kegiatan dengan OPD terkait maupun stakeholder;
2. Evaluasi terhadap sekolah ramah anak dilaksanakan dalam bentuk *Forum Group Discussion (FGD)*.

### **SASARAN 7: Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 7 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.23 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,45	persen	75,77	70,35	70,54	73,95	104,83	71,34

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun keatas. TPAK berguna untuk mengetahui seberapa banyak angkatan kerja yang ikut andil dalam perekonomian, karena dengan melihat TPAK dapat diketahui sejauh mana angkatan kerja yang aktif dalam pasar kerja. Dengan menggunakan tiga variabel bebas yaitu upah minimum, penduduk usia prima dan penduduk usia tua.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022, serta melebihi target yang telah ditetapkan oleh RPJMD sebesar 70,54 persen. Sedangkan perbandingan TPAK Kota Pekalongan dengan Daerah lain, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.24 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No.	Daerah	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Nasional	67,80	68,63	69,48
2.	Jawa Tengah	69,58	70,84	71,72
3.	Kota Pekalongan	75,77	70,35	73,95
4.	Kabupaten Batang	71,40	74,90	76,62

Sumber data : Badan Pusat Statistik Nasional dan Jawa Tengah, 2024

Faktor – faktor yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah terkait, stakeholder dan masyarakat sebagai penerima manfaat;
2. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang/UPTD BLK / LPKS/ Instansi/ Lembaga lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Kerjasama yang baik antar tim dan staf terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Meningkatnya partisipasi perusahaan dalam mengikuti kegiatan;
5. Adanya Kerjasama yang baik dari Manajemen / HRD Perusahaan;
6. Adanya komunikasi yang dapat dilakukan dengan mudah;
7. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan;

8. Kerjasama dan koordinasi antar bidang dalam ketepatan waktu pelaksanaan.
9. Anggaran/ dana yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi :

1. Menjalin hubungan kerjasama yang lebih luas antarsektor maupun stakeholder baik dalam hal pelatihan kerja maupun penempatan alumni siswa pelatihan;
2. Perlunya teknologi lebih lanjut pada beberapa sektor program/ kegiatan;
3. Adanya upaya Sarana dan prasarana komunikasi harus memadai;
4. Mengusahakan adanya bantuan alat dan modal bagi peserta pelatihan kerja;
5. Mengusahakan bantuan modal bagi masyarakat yang akan berwirausaha pasca pelatihan;
6. Peningkatan koordinasi dengan perusahaan dan BKK dalam rangka kegiatan Job Fair untuk meningkatkan angka penempatan sehingga pengangguran dapat ditekan;
7. Melakukan kegiatan pada awal tahun sehingga dapat melakukan evaluasi dalam kegiatan sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia;
8. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Daftar Penetapan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas;
9. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien;
10. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai;
11. Perlu dievaluasi schedule kegiatan agar tidak terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada triwulan tertentu sehingga tidak menyulitkan pelaporan pertanggungjawabannya.



Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.	2.741.606.000	3.368.227.000	3.343.274.283
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.	133.500.000	51.000.000	50.960.000
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.	83.930.000	83.930.000	83.277.438
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.	30.000.000	10.310.000	10.200.000
Program Penempatan Tenaga Kerja	Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota.	7.000.000	0	0
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.	85.000.000	0	0
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.	266.700.000	191.700.000	185.164.166
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.	61.000.000	61.000.000	59.986.000
Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	332.155.000	301.455.000	301.068.400
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.	271.155.000	454.005.000	452.430.550
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	681.600.000	476.066.000	472.027.401
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	66.000.000	64.200.000	63.376.800
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	145.000.000	140.000.000	137.237.088
<b>Total</b>		<b>4.904.646.000</b>	<b>5.201.893.000</b>	<b>5.159.002.126</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,18%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 104,83%, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,70% pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik, baik secara intern maupun ekstern (lintas sektor, lembaga masyarakat dan penerima manfaat);

2. Dukungan anggaran yang dapat menjangkau sasaran dan target yang telah ditetapkan;
3. Kegiatan pelayanan yang terkait pelayanan penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas sesuai dengan standar pelayanan yang disediakan;
4. Pengaduan dan permohonan layanan sesuai Standar Pelayanan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dilakukan setiap hari karena ada kebutuhan masyarakat yang memerlukan layanan;
5. Sarana dan prasarana pelatihan/ kegiatan yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

**SASARAN 8 : Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 8 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.25 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	-	Persen	Na	93,97	93,72	95,09	101,46	100,00

Indikator Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi**.

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Suatu pemukiman kumuh dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di pemukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan. Sedangkan kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh merupakan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah

domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan.

Luasan kawasan Kota Pekalongan adalah sebesar 4.642 hektar dan luas kawasan kumuh tahun 2023 yang tersisa adalah 227,5 hektar. Sehingga :

- Persentase perumahan dan permukiman kumuh =  $100 \times (227,55 \text{ hektar} : 4.642 \text{ hektar}) = 4,90 \%$
- Persentase perumahan dan permukiman yang tidak umuh =  $100 \% - 4,90 \% = 95,09 \%$ .

Jumlah kawasan kumuh yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena sarpras permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob.

Tantangan dalam mencapai sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pengembangan perumahan dan ketersediaan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Jalan lingkungan permukiman dan penanganan kawasan permukiman kumuh;
3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh Karena iitu kedepanya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi:

1. Penyusunan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berkualitas;
2. Penetapan legalisasi rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Perumahan Dan Kawasan	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	26.821.676.000	32.967.926.000	32.463.516.732

Permukiman Kumuh	Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
------------------	-------------------------------	--	--	--

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,47 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 101,46 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,03 % pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Melakukan perencanaan dan advokasi penganggaran yang matang dan akurat;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan, penerapan dan pencapaian penganggaran serta kinerja yang baik;
3. Pemenuhan sarana Prasarana untuk menunjang kegiatan.

### **SASARAN 9 : Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 9 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.26 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Luas Genangan Banjir dan Rob	1.730	hektar	1.730	980.14	1.027	880,83	116,59	565

Indikator Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi**.

Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (DPL) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata – rata antara 0 – 5%. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan Saluran Drainase, karena persentase kemiringan lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering

mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat sehingga perlu adanya perhatian dari Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

- Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 hektar.
- Kondisi awal luas genangan rob 1.730 hektar.
- Pada tahun 2023 luas genangan yang tersisa adalah 880.83 Hektar

Apabila dilihat dari target yang ditentukan pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.027 hektar, sedangkan realisasi capaian kinerja adalah 880.83 hektar, maka dapat dikatakan mencapai target. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pengadaan pompa skala wilayah (rumah pompa) dan lingkungan;
2. Pengurusan saluran drainase yang menyebabkan terjadinya penyumbatan aliran air;
3. Normalisasi sungai;
4. Peninggian jalan;
5. Pembangunan Tanggul sungai.

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sasaran ini didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten/ Kota	12.181.766.564	11.969.822.000	11.181.766.564
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.856.909.000	1.853.029.000	1.802.259.266
Rogram Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5.865.233.000	16.583.843.000	16.282.014.737
Total		19.903.908.564	30.406.694.000	29.266.040.567

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 96.24 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 116.59 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat

efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 21,14 % pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Optimalnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan pada program pengelolaan SDA dan Sistem Drainase;
2. Optimalnya pelaksanaan operasional stasiun pompa dan pekerjaan rutin drainase.

### **SASARAN 10 : Menurunnya tingkat pencemaran air**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 10 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.27 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Air	35,33	indeks	13,29	45,33	35,36	48,86	138,18	35,39

Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air dihitung dari hasil konversi Pollution Index (PI). Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Indeks Kualitas Air atau IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Air Kota Pekalongan sebesar 48,86, lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMD dan capaian tahun sebelumnya. Pemantauan kualitas air sungai di Kota Pekalongan dilakukan terhadap 3 sungai yaitu Sungai Pekalongan, Sungai Meduri dan Sungai Banger pada masing-masing bagian hulu, tengah dan hilir sungai. Pemantauan kualitas air dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun dengan ketentuan mewakili musim kemarau (asumsi debit air sungai rendah) dan mewakili musim hujan (asumsi debit air sungai tinggi).

Tabel 3.28 Perbandingan Indeks Kualitas Air dengan Daerah lain di Wilayah Jawa

### Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Daerah	Nilai Indeks Kualitas Air
1.	Provinsi Jawa Tengah	51,23
2.	Kabupaten Batang	41,67
3.	Kabupaten Pekalongan	33,64
4.	Kabupaten Pemasang	53,33
5.	Kabupaten Tegal	58,82
6.	Kota Pekalongan	48,86
7.	Kota Tegal	51,11

Sumber data : Ekspose IKLH Provinsi Jawa Tengah, 2024

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target kinerja:

1. Sosialisasi pengelolaan limbah terhadap usaha dan kegiatan di Kota Pekalongan;
2. Kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan kegiatan di kota Pekalongan yang menghasilkan limbah;
3. Pengawasan hasil uji laboratorium untuk hasil olahan Ipal usaha/ kegiatan dan rekomendasi untuk ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup.
4. Adanya IPAL batik secara komunal di 3 lokasi, yaitu Kelurahan Kauman, Kelurahan Jenggot dan Kelurahan Banyurip;
5. Adanya layanan sedot limbah industri bagi usaha dan kegiatan yang belum memiliki IPAL.

Strategi untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang :

1. Menyusun DE Pembangunan IPAL Jenggot II;
2. Revitalisasi Ipal Komunal Jenggot untuk mengoptimalkan kinerja IPAL dan mengoptimalkan debit olahan;
3. Mengupgrade Ipal Komunal Jenggot yang sudah menurun kinerjanya karena usia Ipal, faktor teknis adanya penyumbatan di bak *wet land*;
4. Perbaikan Ipal Pringrejo yang tidak berfungsi;
5. Memberikan layanan sedot limbah industri bagi usaha dan kegiatan yang belum memiliki IPAL.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan dan/atau Pencemaran kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	1.048.194.000	1.026.054.000	986.884.158
	Penanggulangan dan/atau Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	463.648.000	468.777.000	438.485.333
<b>Total</b>		<b>1.511.842.000</b>	<b>1.494.831.000</b>	<b>1.425.369.491</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,35 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 138,18 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 44,91 % pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Adanya koordinasi yang baik;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.

### SASARAN 11 : Optimalnya Kualitas Lahan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 11 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.26 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Lahan	23,60	indeks	32,38	23,77	23,60	24,39	103,35	23,61

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan seperti semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, Ruang Terbuka Hijau dan area rehabilitasi hutan dan lahan. Indeks kualitas tutupan lahan sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau.

Pada tahun 2023, indeks kualitas lahan sebesar 24,39, melebihi target RPJMD yang telah ditentukan dan capaian tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan Indeks Kualitas Lahan Kota Pekalongan dengan daerah sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.30 Perbandingan Indeks Kualitas Lahan dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Daerah	Nilai Indeks Kualitas Lahan
1.	Provinsi Jawa Tengah	46,34
2.	Kabupaten Batang	45
3.	Kabupaten Pekalongan	58,28
4.	Kabupaten Pemalang	52,4
5.	Kabupaten Tegal	40,68
6.	Kota Pekalongan	24,39
7.	Kota Tegal	34,58

Sumber data : Ekspose IKLH Provinsi Jawa Tengah, 2024

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target kinerja:

1. Penambahan luasan ruang terbuka hijau dengan pembangunan taman, rehabilitasi taman dan penanaman pohon di Kota Pekalongan;
  2. Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan dan persampahan.
- Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan dan/atau Pencemaran kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	1.048.194.000	1.026.054.000	986.884.158
	Penanggulangan dan/atau Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	463.648.000	468.777.000	438.485.333
<b>Total</b>		<b>1.511.842.000</b>	<b>1.494.831.000</b>	<b>1.425.369.491</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,35 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 103,35 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,39 % pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Adanya koordinasi yang baik;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan

kegiatan.

**SASARAN 12 : Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 12 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 25 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Tidak Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.31 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 12

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	-	regulasi	Na	1,00	7,00	3,00	42,85	7

Indikator Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi**.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kota Pekalongan, menyebabkan kebutuhan akan ruang semakin meningkat. Sementara ketersediaan ruang terbatas dan tidak bertambah, serta terdapatnya kawasan-kawasan yang tidak bisa dibangun dikarenakan adanya banjir rob. Untuk itu setiap elemen di dalam ruang harus saling bersinergi dan harus ada pengaturan, tanpa adanya pengaturan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Bertambahnya penduduk juga akan meningkatkan kebutuhan akan ruang, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksiuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh banyak faktor sehingga untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang agar pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang.

Dengan ditetapkannya Peraturan terkait dengan Perencanaan Tata Ruang dan pemanfaatan Ruang diharapkan pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan sesuai

dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga dapat meminimalisir /mengurangi dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Sampai dengan tahun 2023, terdapat 3 (tiga) regulasi yang telah diterbitkan terkait bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan, diantaranya Perda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Perda tentang Garis Sempadan dan Perwal tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan dan pembebasan Pokok Denda Retribusi PBG.

Masih terdapat 4 (empat) regulasi yang belum tercapai, 3 (tiga) regulasi rencana akan dibuat di Tahun 2024 antara lain Perda Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Perwal Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan dan Perwal Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Menara Telekomunikasi, Tiang *Microcell* Dan Jaringan Fiber Optik, sedangkan 1 (satu) regulasi direncanakan di Tahun 2025 yaitu Perwal Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	25.000.000	25.000.000	17.740.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	353.600.000	437.595.000	433.974.755
Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan, Gedung (TABG), Pendataan Bangunan, Gedung, serta implementasi SIMBG	236.000.000	314.000.000	285.791.260
<b>Total</b>		<b>614.600.000</b>	<b>776.595.000</b>	<b>737.506.015</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 94.96 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 42.85 %, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efesiensi sumber daya pada sasaran ini.

### SASARAN 13 : Optimalnya layanan air minum

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 13 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.32 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 13

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	-	persen	Na	100	100	100	100	100

Indikator Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi**.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, guna mencapai salah satu visi yaitu mewujudkan kemajuan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan sinergitas dalam pengelolaan kawasan, tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Peningkatan peran pelayanan dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Salah satu hal yang sangat dibutuhkan adalah penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hingga saat ini peningkatan infrastruktur masih terus dilakukan tanpa mengenyampingkan kualitasnya.

Pada tahun 2023, persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum di Kota Pekalongan telah mencapai 100%. Artinya, seluruh penduduk di Kota Pekalongan telah mendapatkan akses terhadap air minum yang memadai. Kebutuhan air bersih Penduduk Kota Pekalongan dipenuhi dari sumber PAMSIMAS dan PDAM yang berasal dari sumber Air Bawah tanah (ABT) dan air permukaan (bekerjasama dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang melalui SPAM Petanglong).

Faktor pendukung tercapainya persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum di Kota Pekalongan antara lain :

1. Dukungan infrastruktur dari pemerintah kota, provinsi maupun pusat;
2. Optimalnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih;

3. Adanya pembangunan perluasan perpipaan di Perkotaan sepanjang 10.245 meter;
4. Penambahan jaringan Sambungan Rumah (SR) 741.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	265.000.000	405.000.000	381.744.000
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	675.000.000	725.000.000	720.839.400
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.176.798.000	1.427.305.000	1.391.224.552
<b>Total</b>		<b>2.116.798.000</b>	<b>2.557.305.000</b>	<b>2.493.807.952</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 97.52 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2.54 % pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Penetapan prioritas pada program atau kegiatan unggulan di Cipta Karya yaitu program 100-0-100. Program 100-0-100 ini merupakan sebuah program menuju pemenuhan target tiga sektor antara lain pemenuhan 100 persen akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0 persen, dan pemenuhan 100 persen akses sanitasi layak. Program ini selaras dengan tujuan organisasi dan visi dan misi Walikota Pekalongan. Fokus pada program-program ini membantu memaksimalkan hasil dengan anggaran yang terbatas;
2. Pemanfaatan sumber daya manusia secara efisien dapat dicapai dengan menempatkan staf pada tugas-tugas yang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Pelatihan dan pengembangan karyawan juga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja unit kerja. Penugasan staf untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif secara rutin untuk

memastikan bahwa setiap anggaran digunakan dengan efisien dan efektif. Ini melibatkan penilaian berkala terhadap progres program, pengukuran kinerja, dan penyesuaian strategi bila diperlukan;

3. Pemantauan dan pengendalian belanja merupakan langkah penting dalam mencapai efisiensi. DPUPR Kota Pekalongan menjaga agar belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan, salah satunya dengan menyusun kontrol kendali pengeluaran anggaran;
4. Dengan dilakukannya sosialisasi ke masyarakat untuk setiap pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan, maka hal ini memicu keterlibatan masyarakat dalam membantu meningkatkan akseptabilitas program. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga membantu dalam memperoleh usulan-usulan serta pengawasan yang membantu pekerjaan konstruksi agar selaras pada pembangunan yang berkeadilan lingkungan.

#### **SASARAN 14 : Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 14 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.33 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 14

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase pelayanan sampah	67,12	Persen	73,75	72,36	70,12	71,45	101,89	73,12

Indikator Persentase tingkat pelayanan sampah merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi**.

Persentase tingkat pelayanan sampah merupakan cakupan dari rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kota Pekalongan. Pada tahun 2023, jumlah seluruh rumah tangga di Kota Pekalongan sebanyak 76.937 rumah tangga, sedangkan jumlah rumah tangga yang terlayani sampahnya sebanyak 54.968 rumah tangga.

Sehingga persentase pelayanan sampah dapat dihitung sebagai berikut =  
(54.968 /76.937) = 71,45 % rumah tangga yang terlayani.

Hal ini didukung oleh faktor-faktor berikut :

1. Revitalisasi TPS 3R di Kota Pekalongan;
2. Penambahan sarpras pengelolaan kebersihan dan persampahan;
3. Efektivitas dan kedisiplinan SDM terutama tenaga kebersihan di lapangan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	10.660.320.000	10.508.789.000	10.146.104.005

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 96,55%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 104,24 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,96 % pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Adanya koordinasi yang baik;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.

### **SASARAN 15 : Meningkatnya layanan transportasi perkotaan**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 15 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.34 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 15

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	-	kategori	3,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00
2	Persentase keterhubungan jalan	-	persen	Na	100	97,20	100,00	102,88	100

Indikator Persentase Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*) dan Persentase

keterhubungan jalan merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

#### 1. Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)

Tingkat pelayanan jalan adalah suatu ukuran kualitatif yang menjelaskan kondisi-kondisi operasional didalam suatu aliran lalu lintas dan persepsi dari pengemudi dan penumpang terhadap kondisi-kondisi tersebut. Faktor- faktor seperti kecepatan dan waktu tempuh, kebebasan bermanuver, perhentian lalu lintas, dan kemudahan serta kenyamanan adalah kondisi-kondisi yang mempengaruhi LoS. Setiap fasilitas dapat dievaluasi berdasarkan enam tingkat pelayanan, A sampai F, dimana A mempresentasikan kondisi operasional terbaik dan F untuk kondisi terburuk.

Tingkat pelayanan jalan Kota Pekalongan tahun 2023 telah mencapai target yang sudah ditetapkan. Dimana berdasarkan hasil survai lalu lintas Kota Pekalongan tahun 2023 didapatkan hasil rata-rata Tingkat Pelayanan Jalan **B** yaitu dengan kriteria arus lalu lintas stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, kepadatan lalu lintas rendah, hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan dan pengemudi masih punya kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan. Dari hasil diatas maka arus lalu lintas di dalam kota di Kota Pekalongan masih dalam kondisi yang baik.

Faktor – faktor yang mendukung tercapainya target kinerja :

- a. Melaksanakan Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) dibeberapa Ruas Jalan di Kota Pekalongan sebagai upaya pengurangan kepadatan arus lalu lintas di Kota Pekalongan;
- b. Melakukan Rekayasa Lalu Lintas pada kawasan yang memiliki kepadatan arus lalu lintas;
- c. Adanya patroli rutin di kawasan parkir yang tidak sesuai tempatnya dan pelanggaran pengguna jalan guna mengurangi tingkat pelanggaran lalulintas.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran, diantaranya

adalah :

- a. Jumlah kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil yang jumlahnya terus meningkat sedangkan kapasitas jalan tidak bertambah (tetap) sehingga meningkatkan kepadatan arus lalu lintas.
- b. Masih banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu parkir kendaraan yang tidak sesuai aturan dan derajat parkir yang tidak sesuai marka parkir yang mengakibatkan kepadatan jalan yang menghambat lalu lintas jalan.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi :

- a. Menambah Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di beberapa ruas jalan serta menerapkan tindakan Penderekan dan Penggembokan terhadap Kendaraan yang melanggar Rambu Larangan Parkir;
- b. Mengusulkan pembiayaan infrastruktur strategis yaitu pembangunan Jalan Lingkar Luar dan Terminal Angkutan Barang di Kota Pekalongan melalui APBD Kota Pekalongan, APBD Provinsi maupun APBN;
- c. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai manfaat angkutan umum serta mengajak *stakeholder* yang terkait untuk ikut berpartisipasi menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk LLAJ Kabupaten/Kota	2.780.148.000	2.823.898.000	2.817.345.446

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,77 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100 %. Efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,23%. Efisiensi disebabkan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mengoptimalkan penggunaan anggaran pada pelaksanaan penyusunan dokumen rencana induk LLAJ Kabupaten/Kota.

## 2. Persentase keterhubungan jalan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa Sistem Jaringan Jalan merupakan Satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem Jaringan Jalan disusun dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam Kawasan perkotaan, dan Kawasan perdesaan.

Persentase keterhubungan jalan Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar 100%, artinya seluruh jalan yang terbangun telah terhubung. Total panjang jalan di Kota Pekalongan sepanjang 153,607 dengan rincian kondisi sebagai berikut :

Tabel 3.35 Rekapitulasi Prosentase Kondisi Jalan Tahun 2023

KONDISI	% PANJANG	% PANJANG	KM PANJANG	KEMANTAPAN
BAIK	80,12%	83,77%	128,677	83,77%
SEDANG	3,65%			
RUSAK RINGAN	6,22%	16,23%	24,930	16,23%
RUSAK BERAT	10,01%			

Sumber data : DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Dari tabel diatas, jalan Kota Pekalongan tahun 2023 dengan kondisi BAIK sebesar 80,12%, SEDANG sebesar 3,65%, RUSAK RINGAN sebesar 6,22% dan RUSAK BERAT sebesar 10,01%.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Penyusunan Rencana,Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	64.500.000	64.500.000	63.882.000
	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	126.100.000	126.100.000	124.720.000
	Pembangunan Jalan	1.300.000.000	705.124.000	680.942.500
	Rekonstruksi Jalan	3.364.000.000	14.629.270.000	14.557.923.820
	Rehabilitasi Jalan	1.186.975.000	832.518.000	829.078.800
	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.920.200.000	4.005.710.000	3.874.425.549
	Penggantian Jembatan	1.200.000.000	1.172.765.000	1.165.021.000
	Pemeliharaan Rutin	547.200.000	543.300.000	465.054.089

Jembatan			
<b>TOTAL</b>	<b>10.708.975.000</b>	<b>22.079.287.000</b>	<b>21.761.047.758</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,56 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 102.88 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,383 % pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Penetapan prioritas pada program atau kegiatan unggulan di bidang jalan dan jembatan yang memiliki manfaat terbesar terhadap tujuan organisasi dan selaras dengan visi dan misi Walikota Pekalongan. Fokus pada program-program ini membantu memaksimalkan hasil dengan anggaran yang terbatas;
2. Pemanfaatan sumber daya manusia secara efisien dapat dicapai dengan menempatkan staf pada tugas-tugas yang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Pelatihan dan pengembangan karyawan juga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja unit kerja;
3. Monitoring dan evaluasi yang efektif secara rutin untuk memastikan bahwa setiap anggaran digunakan dengan efisien dan efektif. Ini melibatkan penilaian berkala terhadap progres program, pengukuran kinerja, dan penyesuaian strategi bila diperlukan;
4. Pemantauan dan pengendalian belanja merupakan langkah penting dalam mencapai efisiensi. DPUPR Kota Pekalongan menjaga agar belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan, salah satunya dengan Menyusun kotrol kendali pengeluaran anggaran.
5. Dengan dilakukannya sosialisasi ke masyarakat untuk setiap pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan, maka hal ini memicu keterlibatan masyarakat dalam membantu meningkatkan akseptabilitas program. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga membantu dalam memperoleh usulan-usulan serta pengawasan yang membantu pekerjaan konstruksi agar selaras pada pembangunan yang berkesejahteraan lingkungan.
6. Adanya kucuran program dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, hal ini

secara signifikan sangat membantu menaikkan prosentase kemandirian jalan sehingga menyebabkan kenaikan secara pesat pada tingkat capaian kinerja saasaran meskipun anggaran APBD Kota sangat terbatas. Program-program tersebut bersumber dari dana Instruksi Presiden dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

### **SASARAN 16 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi**

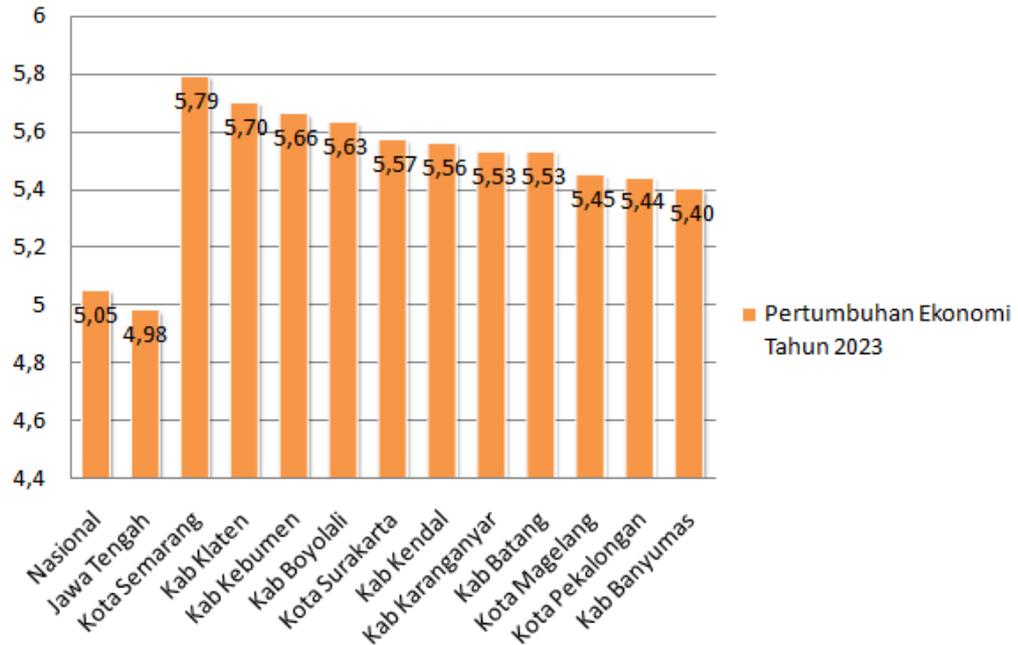
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 16 dengan 1 indikator kinerja dengan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.36 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 16

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Pertumbuhan ekonomi	-1,87	Persen	3,59	5.76	2,48-2,83	5,44	192,23	4,55

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), modal, sosial budaya dan perkembangan teknologi. Sedangkan beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2023 tumbuh di angka 5,44%, cenderung menurun dari tahun 2022 yang sebesar 5.76%. Pada Tahun 2023, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Pekalongan secara total mencapai Rp. 13,744 Milyar. Sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 (ADHK) tercatat sebesar Rp. 8,477 Milyar. Dari sisi produksi, lapangan usaha sektor konstruksi mengalami pertumbuhan paling tinggi sebesar 0,52 %, sektor transportasi/ sebesar 0,51 %, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,27 %, dan jasa perusahaan sebesar 0,01 %. sedangkan sektor lapangan usaha lainnya cenderung mengalami penurunan.

Gambar 3.3 Perbandingan Pertumbuhan dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2023

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar 5,44 berada di peringkat 10 dari Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah, lebih tinggi dari Nasional yang tumbuh sebesar 5,05 dan Jawa Tengah sebesar 4,98.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program pengembangan iklim penanaman modal	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	40.852.000	40.759.200
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	15.600.000	15.600.000
Program promosi penanaman modal	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	42.567.000	42.567.000
Program pelayanan penanaman modal	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	498.328.000	498.204.919
	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	246.800.000	246.761.560



PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	85.292.000	85.283.900
	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	120.000.000	119.949.000
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	34.400.000	34.158.050
	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	366.916.000	349.891.450
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	87.174.000	87.167.000
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	108.950.000	107.792.946
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.890.000	179.352.220
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2.321.004.000	2.317.668.210
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	904.000	900.000
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.850.000	3.850.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.579.873.000	1.573.861.041
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	784.089.000	709.270.571
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	476.066.000	472.027.401
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	64.200.000	63.376.800
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000	137.237.088
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	142.000.000	139.844.800
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.330.296.000	4.309.903.683
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	1.937.000
Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	952.776.000	947.914.506



PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	Kabupaten/Kota		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	452.820.000	451.747.000
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	23.775.000	23.750.000
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	108.732.000	107.659.961
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	64.597.000	64.236.220
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam daerah Kabupaten/Kota	91.361.000	88.983.843
	Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota	152.000.000	151.388.500
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	400.347.000	386.657.110
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veterier	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.200.000	49.328.904
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	185.575.000	143.009.700
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner	144.642.000	143.481.935
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	43.961.000	42.023.500
Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan izin usaha produksi benih / bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Potong Hewan	23.498.000	18.522.800
Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	48.644.000	46.941.800
Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.591.000	70.470.901
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	552.429.000	543.046.478

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.167.337.000	6.975.103.164
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	225.000.000	160.025.000
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	133.767.000	133.018.752
	Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kab/ Kota	5.000.000	4.776.900
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	363.775.000	359.816.700
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	4.316.000	2.584.000
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1.000.000	999.900
<b>TOTAL</b>		<b>22.949.194.000</b>	<b>22.452.851.413</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 97,83 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 192,23 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini sebesar 96,49 %.

### SASARAN 17 : Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 17 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.37 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 17

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	68,89	persen	86,67	95,56	91,11	111,11	121,95	100

Indikator Persentase Penyelenggaraan Event Budaya merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi**.

Penyelenggaraan Event Budaya merupakan salah satu kegiatan yang identik dengan budaya atau memiliki nilai sosial yang tinggi dalam tatanan masyarakat. Penyelenggaraan Event Budaya bertujuan untuk Melestarikan Budaya, Kearifan

Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaql Karimah.

Pada tahun 2023, telah terselenggara 8 (delapan) event kebudayaan di Kota Pekalongan. Event tersebut diantaranya acara Sadranan, Bubur Suro, 1 Muharrom Peringatan, Hari Pancasila (wayang), Peringatan Bulan Pancasila, Festival Pintu Dalem, Hayam Wuruk, Warung Apresiasi.

Faktor pendukung ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan di bidang kebudayaan;
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang kebudayaan;
3. Adanya dukungan yang kuat masyarakat Kota Pekalongan untuk melestarikan budayanya.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.313.720.000	1.279.720.000	1.277.890.000
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	518.157.000	385.000.000	384.588.000
<b>Total</b>		<b>1.831.877.000</b>	<b>1.664.720.000</b>	<b>1.662.478.000</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99.86 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 121.95 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22,12 % pada sasaran ini. Efisiensi ini dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

### **SASARAN 18 : Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 18 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator

kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.38 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 18

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100	persen	100	100	100	100	100	100

Indikator Pengelolaan Potensi Konflik Sosial merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

Pengelolaan Potensi Konflik Sosial merupakan salah satu bentuk perwujudan Misi ke enam Pemerintah Kota Pekalongan yaitu Melestarikan Budaya, Kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah, yang bertujuan agar tercipta kondisi masyarakat yang aman, tentram dan kondusif.

Pada tahun 2023, persentase pengelolaan potensi konflik sosial Kota Pekalongan tercapai 100%. Dengan kata lain, dari semua potensi konflik sosial yang ada telah dapat dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi konflik sosial di masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini:

1. Kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat akan wawasan kebangsaan, semangat persatuan dan kesatuan, pemahaman tentang pluralisme, nilai pancasila, ideologi bangsa serta nasionalisme di masyarakat;
2. Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam hal ini melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan selalu bekerjasama dengan stakeholder terkait yaitu Forkompimda, DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Organisasi Masyarakat selalu melakukan himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, persatuan kesatuan bangsa baik melalui spanduk, pamflet maupun media lainnya
3. Masyarakat Kota Pekalongan mampu bersama – sama menjaga perbedaan yang ada dan menumbuhkembangkan toleransi.

Dalam rangka untuk mempertahankan ketiadaan konflik sosial pada tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi :

1. Memberikan Pemantapan semangat rasa persatuan dan kesatuan yang

- berwawasan kebangsaan kepada masyarakat;
2. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai – nilai Pancasila, ideologi Bangsa serta Nasionalisme kepada masyarakat;
  3. Melaksanakan pembinaan melalui penyuluhan, sosialisasi dan Pendidikan kepada masyarakat dan aparatur di bidang kesatuan bangsa;
  4. Meningkatkan pemahaman pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
  5. Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan;
  6. Meningkatkan sinergi pemerintah dan masyarakat dalam upaya deteksi dini dan penanganan gangguan kerawanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketahanan;
  7. Mendukung dan menciptakan komunikasi antar tokoh umat beragama dalam bingkai FKUB;
  8. Peningkatan dan pemahaman kepada generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.892.149.000	1.736.749.000	1.682.920.630
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.221.943.000	7.046.372.000	7.022.927.891
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	680.000.000	605.000.000	575.000.000



Kemasyarakatan	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	620.593.000	462.403.000	459.212.163
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	91.098.000	83.057.000	81.535.300
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	16.000.000	15.445.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.800.506.000	1.643.130.000	1.567.045.311
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.619.000	135.185.000	134.321.762
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.508.000	251.508.000	240.636.935
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.879.000	57.479.000	53.946.962
<b>TOTAL</b>		<b>6.763.295.000</b>	<b>12.041.883.000</b>	<b>11.840.191.954</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,33 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,67 % pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dan disesuaikan dengan kondisi *real* di lapangan sehingga tepat sasaran dan anggaran;
2. Dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

### **SASARAN 19 : Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 19 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator

kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.39 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 19

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks SPBE	3,19	indeks	2,82	3,14	2,95	3,29	111,53	3,25

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi : Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; Data dan Informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Pada tahun 2023, Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2023, pemerintah kota pekalongan memperoleh indeks evaluasi SPBE tahun 2023 yaitu 3.29 (Baik).

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Indeks SPBE Kota Pekalongan berada pada peringkat 24 dari 35 Kabupaten/Kota. Berikut di bawah ini merupakan tabel perbandingan Indeks SPBE dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 :

Tabel 3.40 Perbandingan Indeks SPBE dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Daerah	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4,35	Memuaskan
2	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,26	Memuaskan



3	Pemerintah Kab. Sragen	4,26	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Kudus	4,23	Memuaskan
5	Pemerintah Kab. Wonogiri	3,94	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Semarang	3,89	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,83	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Tegal	3,76	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Pati	3,74	Sangat Baik
10	Pemerintah Kota Surakarta	3,74	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Kebumen	3,7	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Klaten	3,7	Sangat Baik
13	Pemerintah Kab. Boyolali	3,65	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Rembang	3,64	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Jepara	3,63	Sangat Baik
16	Pemerintah Kab. Demak	3,62	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Wonosobo	3,54	Sangat Baik
18	Pemerintah Kab. Batang	3,53	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,52	Sangat Baik
20	Pemerintah Kab. Cilacap	3,46	Baik
21	Pemerintah Kab. Banyumas	3,39	Baik
22	Pemerintah Kab. Grobogan	3,37	Baik
23	Pemerintah Kota Magelang	3,36	Baik
24	Pemerintah Kab. Banjarnegara	3,29	Baik
25	<b>Pemerintah Kota Pekalongan</b>	<b>3,29</b>	<b>Baik</b>
26	Pemerintah Kab. Blora	3,27	Baik
27	Pemerintah Kab. Semarang	3,26	Baik
28	Pemerintah Kota Salatiga	3,26	Baik
29	Pemerintah Kab. Purworejo	3,19	Baik
30	Pemerintah Kab. Magelang	3,13	Baik
31	Pemerintah Kab. Tegal	3,07	Baik
32	Pemerintah Kab. Kendal	2,95	Baik
33	Pemerintah Kab. Pemasang	2,94	Baik
34	Pemerintah Kab. Pekalongan	2,86	Baik
35	Pemerintah Kab. Brebes	2,83	Baik
36	Pemerintah Kab. Temanggung	2,8	Baik

Sumber : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, 2024

**Kekuatan** : Pada aspek teknologi informasi dan komunikasi terdapat 1 indikator terkait tata kelola yang dapat menjadi kekuatan pada sisi perencanaan strategis Kota Pekalongan yaitu Indikator Layanan Jaringan Intra yang berada ditingkat kematangan level 4.

**Kelemahan** : Pemerintah Kota Pekalongan memiliki 1 indikator yang bisa menjadi titik kelemahan yaitu indikator Penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang berada ditingkat kematangan level 2.

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun selanjutnya:

1. Meningkatkan indikator Layanan Jaringan Intra yang sebelumnya level 4 menjadi level 5 dengan melakukan upaya peningkatan/perbaikan terhadap pengoperasian Jaringan Intra yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
2. Meningkatkan indikator Pembangunan Aplikasi SPBE dan indikator Layanan Pusat Data yang sebelumnya level 3 menjadi level 4 dengan melakukan upaya :
  - a. Indikator Pembangunan Aplikasi SPBE = Membangun/mengembangkan Aplikasi yang dilaksanakan secara terpadu dan dapat dikendalikan serta dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik;
  - b. Indikator Layanan Pusat Data = Memiliki Layanan Pusat Data yang mendukung interkoneksi /integrasi dengan pusat data yang diselenggarakan oleh IPPD lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.
3. Meningkatkan indikator Penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang sebelumnya level 2 menjadi level 3 dengan upaya menerapkan Sistem Penghubung Layanan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	2.132.500.000	2.111.337.494
	penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	6.600.000	6.500.000
	penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	2.125.900.000	2.104.837.494
	pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	1.020.582.000	995.465.307
	sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	219.330.000	216.770.700
	pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	331.619.000	331.039.140
	pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	347.294.000	326.129.267



	pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	73.404.000	73,052.200
	pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	29.250.000	28.957.500
	monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	19.685.000	19.516.500
	<b>TOTAL</b>	<b>3.153.082.000</b>	<b>3.106.802.801</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98.53 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 111,53 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 13,19 % pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait peningkatan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran kinerja program;
2. Adanya perbaikan temuan pada audit SPBE dari periode sebelumnya.

### **SASARAN 20 : Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 20 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.41 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 20

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	IKM Kota	83,19	persen	83,34	90,44	83,64	90,69	108,43	84,09
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	91,00	skor	93,00	90,01	96,00	96,62	100,65	97,50

Indikator diatas merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan yang merupakan salah satu program unggulan Walikota Pekalongan, **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi**.

#### 1. IKM Kota

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota

Pekalongan. Penilaian kualitas pelayanan publik dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal satu tahun sekali. Adapun unsur yang dinilai meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/ tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan.

Pada tahun 2023, dilakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri pada 79 OPD/ Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Dari hasil pengukuran didapatkan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,69. Secara umum dapat diketahui bahwa kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh UPP di Kota Pekalongan terbilang baik dan terus-menerus mengalami peningkatan. Grafik dibawah menunjukkan nilai indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 :

Gambar 3.4 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 – 2023



Sumber data : Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2023  
Pemerintah Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan indeks SKM pada tahun 2023. Pada tahun 2023 tercatat terjadi kenaikan indeks SKM dari 90,44 pada tahun 2022 menjadi 90,69 pada tahun 2023. Dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, tim pelaksana juga mengumpulkan masukan dan saran dari para responden. Masukan dan saran tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh UPP dengan memberikan tanggapan ataupun rencana tindak lanjut.

Faktor pendukung keberhasilan pada sasaran ini sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen dari Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. Adanya perbaikan fasilitas pelayanan di masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Selain itu juga didukung dengan program dan kegiatan serta anggaran yang memadai, dengan rincian sebagai berikut;

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	385.829.000	297.369.000	296.981.101

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,87%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 108,43%, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,57% pada sasaran ini. Efisiensi ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat menggunakan jasa konsultan. Sedangkan tahun 2023, survei kepuasan masyarakat dilakukan secara mandiri sehingga dapat mengefisiensi anggaran.

## 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinkominfo telah

memberikan layanan akses keterbukaan informasi publik pada OPD secara bertahap. Seluruh OPD telah melakukan publikasi dokumen yang berisi informasi publik melalui web *ppip.pekalongankota.go.id*. Kemudian pada tahun 2017 telah melakukan penilaian atas keterbukaan informasi publik pada OPD. Pada tahun 2023, indeks KIP Kota Pekalongan masuk kedalam kategori INFORMATIF dengan nilai 96,62. Nilai tersebut sudah mencapai target RPJMD yang ditetapkan karena nilai tersebut diperoleh dari penilaian eksternal dari KIP Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi :

- a. Perlunya Komitmen Walikota dalam kelangsungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik (KIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. Harus dilaksanakan koordinasi antar Perangkat Daerah;
- c. Mengoptimalikan peran Admin dalam pengelolaan data Perangkat Daerah berjalan lancar.
- d. Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	15.755.000	12.717.000
	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	125.700.000	124.928.810
	Pengelolaan media komunikasi publik	2.947.804.000	2.926.882.094
	Pelayanan informasi publik	238.172.000	236.991.790
	Layanan hubungan media	1.595.375.000	1.582.973.284
	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	131.905.000	131.753.000
	Manajemen komunikasi krisis	362.430.000	360.591.914
	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	24.420.000	23.665.000
<b>Total</b>		<b>5.441.561.000</b>	<b>5.440.502.892</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 99,25 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100,65 %, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,41 %.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait peningkatan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran kinerja program;
- b. Adanya perbaikan temuan pada audit dari KIP dari periode sebelumnya;
- c. Peningkatan kinerja dalam menyelenggarakan program dan kegiatan.

### **SASARAN 21 : Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 21 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.42 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 21

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Merit System	200,00	indeks	215,00	264,5	240,00	327,00	136,25	260,00

Sistem Merit adalah merupakan kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pengukuran Indeks penerapan Sistem Merit digunakan untuk menghitung keberhasilan suatu kegiatan yang mengatur terkait manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi serta kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Sistem merit dibuat untuk memenuhi empat tujuan, yaitu merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat, serta melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit.

Pada tahun 2023, indeks merit system Kota Pekalongan memperoleh nilai sebesar 327, melebihi target yang telah ditetapkan RPJMD dan capaian tahun-tahun sebelumnya. Adapun perbandingan indeks merit system Kota Pekalongan dengan Daerah lain dan Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.40 Perbandingan Indeks Merit System dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Daerah	Kategori	Nilai
1	Provinsi Jawa Tengah	Sangat Baik	340.5
2	Kota Magelang	Sangat Baik	337.5
<b>3</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>327</b>
4	Kabupaten Wonogiri	Baik	312.5
5	Kabupaten Cilacap	Baik	310
6	Kota Surakarta	Baik	308.5
7	Kabupaten Sukoharjo	Baik	307
8	Kabupaten Purworejo	Baik	302
9	Kota Semarang	Baik	300
10	Kabupaten Magelang	Baik	293

Sumber : Bank Data Sistem Merit, 2024

Faktor pendukung capaian indeks sistem merit menjadi 327 (Kategori Sangat Baik) antara lain :

1. Pada aspek perencanaan kebutuhan, dilakukan:
  - a. Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan analisis jabatan, ABK, pemetaan organisasi dan potensi daerah;
  - b. Pembaharuan aplikasi SIMPEG secara *real time* serta menyajikan data pensiun secara berkala, melalui aplikasi SIPANDAI yang terintegrasi secara dua arah dengan beberapa aplikasi kepegawaian lainnya seperti E-Pensiun, E-KP;
2. Pada aspek pengadaan, dilakukan:
  - a. Pengadaan CASN secara objektif dan transparan tanpa ada kecurangan
  - b. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 100% sesuai unit kerja dan formasi jabatan yang dilamar
  - c. Pelaksanaan Latsar kurang dari 1 tahun TMT CPNS dan program pengembangan kompetensi yang terintegrasi latsar serta melaksanakan evaluasi Latsar CPNS

3. Pada aspek pengembangan karir, dilakukan:
  - a. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh level jabatan, baik JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana
  - b. Penetapan Peraturan Walikota tentang Manajemen Talenta
  - c. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pengembangan kompetensi ASN melalui *capacity building*, diklat, sosialisasi, workshop, magang dan *coaching mentoring*
  - d. Mulai membangun manajemen talenta ASN dengan telah menetapkan perwal manajemen talenta, menyusun SK Tim Manajemen Talenta, draft jabatan kritikal sesuai prioritas Pembangunan, draft Jabatan Target, draft rencana suksesi
4. Pada aspek promosi dan mutasi, dilakukan:
  - a. Penetapan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengisian JPT Pratama
  - b. Seleksi Pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif dengan baik, tanpa adanya aduan pelanggaran sistem merit
  - c. Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan pengawas dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kompetensi melalui *assessment* dan *talent pool*
  - d. Mulai merencanakan pengembangan pola karier dengan telah menetapkan Peraturan Walikota tentang pola karier, penyusunan rencana pengembangan karier ASN setiap tahun meski belum seluruh level jabatan
5. Pada aspek manajemen kinerja, dilakukan:
  - a. Penyusunan kontrak kinerja bagi seluruh pegawai yang diturunkan dari Renstra
  - b. Pemanfaatan aplikasi e-kinerja BKN untuk pengukuran kinerja seluruh ASN
  - c. Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) dengan 60 % komponen berbasis kinerja dan disiplin/ presensi

6. Pada aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, dilakukan:
  - a. Penerapan kode etik dan membentuk majelis kode etik guna penegakan kebijakan secara konsisten
  - b. Penerapan pemberian reward bagi ASN terbaik, baik di tingkat perangkat daerah maupun di tingkat kota
  - c. Pengelolaan data disiplin pegawai melalui aplikasi I'DIS BKN
7. Pada aspek perlindungan dan pelayanan, dilakukan:
  - a. Penetapan berbagai kebijakan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam masa pandemi COVID-19, antara lain pengaturan PPKM, pemberian bansos, santuan kematian, menggalakkan vaksin dan booster
  - b. Perlindungan kepada pegawai, antara lain melalui program pra pensiun, cek kesehatan bagi ASN, dan pendampingan hukum secara berkala
  - c. Penyediaan sistem administrasi pelayanan yang mudah bagi pegawai, antara lain menyediakan fasilitas konseling bagi pegawai
8. Pada aspek sistem informasi, dilakukan:
  - a. Sistem informasi kepegawaian dikelola dengan baik dan bersifat *real time*, yang dapat digunakan sebagai sumber data bagi aplikasi kepegawaian lainnya seperti e-pensiun, e-cuti, e-presensi, e-kinerja, dan lainnya
  - b. Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang terintegrasi pada aplikasi SRIKANDI dan SIASN
  - c. Pemanfaatan assessment center bekerjasama dengan pihak yang kompeten, meski belum dilaksanakan assessment secara menyeluruh semua pegawai (15 % dari total pegawai)

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	228.075.000	263.460.000	261.681.586



	ASN			
	Mutasi dan Promosi ASN	251.175.000	379.744.000	355.261.000
	Pengembangan Kompetensi ASN	448.100.000	139.180.000	123.428.500
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	296.094.000	281.894.000	281.215.100
	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.881.204.000	1.499.594.000	1.483.885.400
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	142.060.000	39.610.000	37.910.000
	<b>TOTAL</b>	<b>3.246.708.000</b>	<b>2.603.482.000</b>	<b>2.543.381.586</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 97,69 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 136,25 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 39,47 % pada sasaran ini.

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa kali pelantikan pejabat struktural, dalam rangka memenuhi keterisian Jabatan Administrator dan Jabatan pengawas;
2. Telah meningkatkan kuantitas dan kualitas Pengembangan kompetensi ASN melalui capacity building, diklat, sosialisasi, Kegiatan Assesment Centre. Pendidikan dan pelatihan selain dilakukan secara klasikal juga dilakukan secara daring atau juga dengan metode blended learning;
3. Telah memanfaatkan aplikasi e-kinerja BKN untuk pengukuran kinerja seluruh ASN. Dalam rangka mempercepat pelaporan kinerja telah dilakukan monitoring dan evaluasi ke OPD, sehingga ASN dapat menyelesaikan SKP tepat waktu;
4. Sistem informasi kepegawaian dikelola dengan baik dan bersifat realtime, yang dapat digunakan sebagai sumber data bagi aplikasi kepegawaian lainnya seperti e-pensiun, e-cuti, e-presensi, e-kinerja, dan lainnya;
5. Telah memanfaatkan assessment center bekerjasama dengan pihak yang kompeten.

## **SASARAN 22 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 22 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala

ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.44 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 22

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP Kota	73,07	skor	73,16	73,31	74,57	72,83	97,67	76,07

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023. Hasil evaluasi Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh nilai 72,83 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.45 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai pada Tahun	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	24,38	23,24
2	Pengukuran Kinerja	30	19,50	20,04
3	Pelaporan Kinerja	15	11,48	11,52
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	17,95	18,03
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>73,31</b>	<b>72,83</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>BB</b>	<b>BB</b>

Sumber data : Kemenpan-RB, 2023

Pada Tahun 2023, nilai evaluasi AKIP Kota Pekalongan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada komponen perencanaan, dimana pada tahun 2022 komponen perencanaan memperoleh nilai 24,38 turun menjadi 23,24 pada tahun 2023. Hal ini berpengaruh pada nilai total evaluasi AKIP, yang sebelumnya memperoleh nilai

73,31 menjadi 72,83 pada tahun 2023.

Berdasarkan capaian nilai evaluasi AKIP di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan berada pada peringkat ke-4 dari 35 Kabupaten/Kota. Adapun perbandingan nilai evaluasi AKIP dengan Kabupaten/Kota di di Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43 Top 7 (Tujuh) Nilai Evaluasi AKIP di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Daerah	Nilai AKIP
1	Kabupaten Banyumas	80,54
2	Kabupaten Wonogiri	75,72
3	Kabupaten Cilacap	74,58
<b>4</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>72,83</b>
5	Kota Magelang	72,12
6	Kabupaten Kudus	72,05
7	Kota Semarang	71,32

Sumber data : Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah, 2024

Faktor penyebab menurunnya nilai evaluasi AKIP Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagian dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah belum baik, masih terdapat sasaran yang belum berorientasi outcome dan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja. Selain itu, ditemukan beberapa Perjanjian Kinerja level kepala dinas yang memasukkan nomenklatur program/kegiatan sebagai sasaran strategis;
2. Pohon kinerja yang disusun belum sesuai dengan kaidah penyusunan pohon kinerja yang ideal, karena yang dijabarkan/dijenjangkan bukan kondisi/kinerja melainkan indikator;
3. Beberapa dokumen perencanaan Perangkat Daerah kurang selaras, utamanya antara Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Masih ditemukan penetapan target Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan/ mempertimbangkan informasi capaian kinerja yang terdapat pada dokumen laporan kinerja. Kondisi ini tergambar dari ditemukannya indikator kinerja yang ditargetkan lebih

rendah daripada realisasi tahun sebelumnya;

5. Substansi pelaporan yang banyak tidak terakomodir dalam laporan kinerja Perangkat Daerah;
6. Laporan hasil evaluasi AKIP internal belum mampu memberikan catatan yang spesifik khususnya terkait kualitas sasaran dan indikator pada dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah.

Upaya yang akan dilakukan guna perbaikan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu seluruh Perjanjian Kinerja Kepala Dinas agar tidak lagi mengawal sasaran strategis berupa nomenklatur program;
2. BAPPEDA agar mengawal perbaikan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk memastikan perubahan yang dilakukan menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas;
3. Menyusun kembali pohon kinerja level Pemda maupun OPD berpedoman pada kaidah yang terdapat pada PerMENPANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu memastikan yang dijabarkan adalah kondisi/kinerja bukan indikator;
4. Memastikan keselarasan kinerja yang dikawal pada dokumen perencanaan OPD khususnya antara Renstra, IKU dan PK;
5. Inspektorat agar melakukan reviu terhadap seluruh dokumen laporan kinerja Perangkat Daerah, kemudian mendorong Perangkat Daerah memastikan seluruh substansi yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri PANRB No.53 Tahun 2014 terakomodir di dalam laporan kinerja yang disusun;
6. Memperbaiki kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal agar dapat memberikan catatan yang lebih spesifik dan substantif khususnya pada komponen perencanaan kinerja Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Penataan Organisasi	385.829.000	297.369.000	296.981.101

Kota

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,87%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 97,67%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

### **SASARAN 23 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 23 dengan 1 indikator kinerja belum dapat diketahui karena data belum dirilis oleh BPK RI. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.47 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 23

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	WTP	kategori	WTP	WTP	WTP	Na	Na	WTP

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2022. Capaian tersebut merupakan predikat yang ke 8 (delapan), sejak pertama kali memperoleh predikat WTP pada tahun 2016 atas Laporan Keuangan Daerah dari BPK RI. Opini BPK atas penyajian Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan telah dapat diyakini kewajarannya oleh BPK. Sedangkan opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah pada Tahun 2023 belum dapat tersedia data (Na) sampai dengan rilis BPK RI terbit.

Tabel 3.48 Perbandingan Opini BPK Tahun 2022

No	Daerah	Opini BPK
1	Provinsi Jawa Tengah	WTP
2	Kota Pekalongan	WTP
3	Kabupaten Batang	WTP
4	Kabupaten Pekalongan	WTP
5	Kabupaten Pemalang	WDP
6	Kota Tegal	WTP

*Sumber data : BPK RI, 2024*

Faktor pendukung keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP adalah sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
2. Peningkatan SDM melalui BinteK/Pelatihan/Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah;
3. Pendampingan/Desk dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan termasuk penyusunan laporan aset dan persediaan;
4. Meninjau dan menyesuaikan regulasi tata kelola keuangan daerah;
5. Dukungan anggaran untuk memperbanyak pengajuan warkah pensertifikatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Pekalongan
6. Kegiatan inventarisasi barang milik daerah;
7. Dilakukan inovasi di bidang keuangan antara lain:
  - a. eMot Pakde (eMonitoring Pajak Daerah) yakni monitoring yang dilakukan secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya
  - b. Sak Rego (peta zona nilai tanah BPN sebagai sumber acuan nilai tanah dalam menentukan besaran PBB dan BPHTB)
  - c. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan pembayaran non tunai untuk pajak dan retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025
  - d. Pelayanan PBB online dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak

- daerah
- e. Pengembangan Aplikasi Pendapatan, Keuangan dan BMD menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  8. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD;
  9. Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Pajak Restoran;
  10. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
  11. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
  12. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;
  13. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
  14. Optimalisasi pelaksanaan penerbitan dan pencairan SP2D;
  15. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.167.650.000	1.092.650.000	992.696.646
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	467.840.000	424.549.000	401.743.730
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	433.944.000	360.109.000	347.170.413
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.855.000.000	3.525.000.000	3.011.729.761
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.365.497.000	1.496.880.000	1.163.419.646
Program Pengelolaan	Kegiatan Pengelolaan	2.524.498.000	2.120.781.000	2.090.199.900



Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah			
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	16.000.000	15.942.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.831.934.000	12.916.761.000	12.119.570.660
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.288.920.000	1.473.730.000	1.387.362.032
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.715.000.000	5.258.700.000	5.236.025.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.536.000	795.350.000	841.256.510
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.448.000	995.748.000	975.290.881
	<b>TOTAL</b>	<b>31.296.267.000</b>	<b>30.481.258.000</b>	<b>28.587.407.679</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 93,78%. Efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dihitung karena capaian kinerja belum diketahui.

#### SASARAN 24 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 24 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 70 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Cukup Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.46 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 24

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Maturitas SPIP	3,02	skor	3,10	3,022	3,40	3,002	88,29	4
2	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	2	OPD	2	2	5,00	3,00	60,00	8

##### 1. Maturitas SPIP

SPIP merupakan salah satu bentuk pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Pencapaian target indikator kinerja Maturitas SPIP tahun 2022 memperoleh skor 3,00. Menurunnya Tingkat Maturitas implementasi SPIP dikarenakan metode penilaian yang berbeda dari tahun sebelumnya dan hal dibawah ini :

- a. Masih terdapat temuan berulang dalam Laporan Hasil Audit BPK;
- b. Pengamanan atas aset negara/daerah masih belum optimal, karena belum seluruh BMN/D yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat berfungsi secara baik dan aman.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan skor maturitas SPIP Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana tindak pengendalian pada seluruh OPD yaitu strategis pemda, strategis OPD dan tingkat operasional OPD;
- b. Menyusun risiko atas kemungkinan fraud dan kemitraan; dan
- c. Inspektorat untuk melaksanakan reviu efektivitas pelaksanaan pengelolaan risiko termasuk risiko fraud dan kemitraan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	23.612.000	23.178.000
	Pendampingan dan Asistensi	209.548.000	208.794.700
<b>TOTAL</b>		<b>233.160.000</b>	<b>31.972.700.</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,49 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 88,29 %, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

## 2. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah

mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2020 DPMPTSP Kota Pekalongan dan Dinarpus Kota Pekalongan berhasil memperoleh predikat WBK. Pada tahun 2023, dari 6 (enam) satuan kerja yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN) Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, 1 (satu) satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK dari Kementerian PAN RB yaitu RSUD Bendan Kota Pekalongan. Dalam rangka untuk meningkatkan capaian OPD menuju WBK/WBBM, maka akan ditempuh strategi :

- a. Meningkatkan penerapan pembangunan zona integritas pada enam area perubahan secara berkelanjutan untuk meningkatkan integritas dan pelayanan kepada *stakeholders*;
- b. Membangun komunikasi dan kedekatan yang lebih intensif dengan pengguna layanan dan *stakeholders* sehingga dapat mengurangi gap antara harapan pengguna layanan dengan kinerja layanan yang diberikan;
- c. Melakukan internalisasi lebih menyeluruh kepada seluruh pegawai terkait pemahaman atas pembangunan zona integritas serta melakukan monev secara berkala atas penerapan zona integritas.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penunjang	Penataan Organisasi	385.829.000	297.369.000	296.981.101

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
---	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,87%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 60%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah. Efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Pekalongan.

Belanja daerah pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023. Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Kota

Pekalongan Tahun 2023 diarahkan pada :

1. Penyesuaian belanja pegawai yang terdiri dari:
  - a. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN berdasarkan realisasi belanja bulan Juni 2023;
  - b. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK tahun 2022;
  - c. Penyesuaian kebutuhan belanja tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD;
  - d. Penyesuaian penggunaan rincian rekening belanja pegawai;
  - e. Penyesuaian kebutuhan belanja pegawai BLUD sesuai dengan hasil SiLPA audited.
2. Penyesuaian rekening belanja atas hasil SiLPA audited yang bersifat transitoris (DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, dan BLUD).
3. Penyesuaian belanja atas perubahan pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4. Penyesuaian belanja atas Peraturan Wali Kota Pekalongan nomor 21 A tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023.
5. Pemenuhan belanja kebutuhan rutin operasional perangkat daerah yang belum teralokasikan 12 bulan.
6. Rasionalisasi atas belanja yang tidak mendesak dan urgen.
7. Pergeseran anggaran antar organisasi/unit organisasi/program/kegiatan/sub kegiatan/kelompok dan jenis belanja.

Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

APBD Kota Pekalongan pada tahun 2023 anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.008.161.164.000,00 dengan rincian realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.028.417.644.274,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.031.847.572.704,00 sehingga terjadi defisit sebesar Rp. 57.286.228.000,00. Sementara itu realisasi pembiayaan dari sisi penerimaan daerah sebesar Rp 69.201.328.575,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu. Dari realisasi

pendapatan sebesar Rp. 1.028.417.644.274,00, PAD memberikan kontribusi sebesar Rp 263.342.597.630,00. Realisasi PAD ini melampaui target dari yang direncanakan sebesar Rp 250.444.667.864,00.

Untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan Kota Pekalongan dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki berupaya menggali dana pembangunan dari berbagai sumber dari sektor jasa, perdagangan, dan sektor sekunder lainnya.

### **3.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Untuk pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor PAD (Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Upaya yang tetap dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Penguatan proses pemungutan melalui penyusunan Perda Pajak dan Perda Retribusi;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang akurat dan akuntabel, yang mampu menyediakan data menyeluruh terhadap potensi pendapatan daerah;
3. Perbaikan administrasi pendapatan melalui penguatan *Standar Operating System* (SOP) pemungutan;
4. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi pajak/retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pendapatan;
6. Memperbaiki sistem pemungutan, pengawasan dan pemberian insentif pada petugas pemungut pendapatan daerah;
7. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan, Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akurasi data;
8. Kemudahan pelayanan pembayaran.

Upaya peningkatan kinerja BUMD melalui bagi hasil deviden dilakukan melalui peningkatan penyertaan modal, peningkatan pengawasan, reformasi SDM dan peningkatan *image* publik terhadap kompetensi BUMD. Sedangkan untuk Lain-lain PAD yang Sah lebih diutamakan pada dua hal yaitu melalui optimalisasi pemanfaatan *idle cash* melalui penempatan deposito yang tepat dan peningkatan pelayanan RSUD Bendan sebagai rumah sakit pilihan utama di Kota Pekalongan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, serta penerapan BLUD Puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan.

Untuk target dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pos yang bisa dioptimalkan adalah dana bagi hasil pajak pusat dan dana bagi hasil pajak provinsi dengan ikut berperan aktif membayar pajak-pajak yang dibagihasilkan seperti pajak penghasilan pasal 21 PNS, dan pajak kendaraan motor milik Pemerintah Kota.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda yang berhubungan dengan pendapatan.

### Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.50 Realisasi Anggaran Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2024 (*Unaudited tanggal 1 Maret 2024*)

No.	Uraian	Target Rp.	Realisasi	
			Rp.	%
4	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>250.444.667.864,00</b>	<b>263.342.597.630,00</b>	<b>105,15</b>
4.1.01	Pajak Daerah	100.800.000.000,00	115.423.918.578,00	114,51

4.1.02	Retribusi Daerah	21.983.402.000,00	16.704.861.471,00	75,99
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.604.200.000,00	7.117.204.338,00	107,77
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	121.057.065.864,00	124.096.613.243,00	102,51
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>755.466.496.136,00</b>	<b>763.287.046.644,00</b>	101,04
4.2.1.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	650.936.473.136,00	667.941.862.118,00	102,61
4.2.1.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.530.023.000,00	95.345.184.526,00	91,21
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>1.008.161.164.000,00</b>	<b>1.028.471.644.274,00</b>	102,01

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Pekalongan tahun 2022, unaudit.

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi perkembangan PAD Kota Pekalongan selama periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

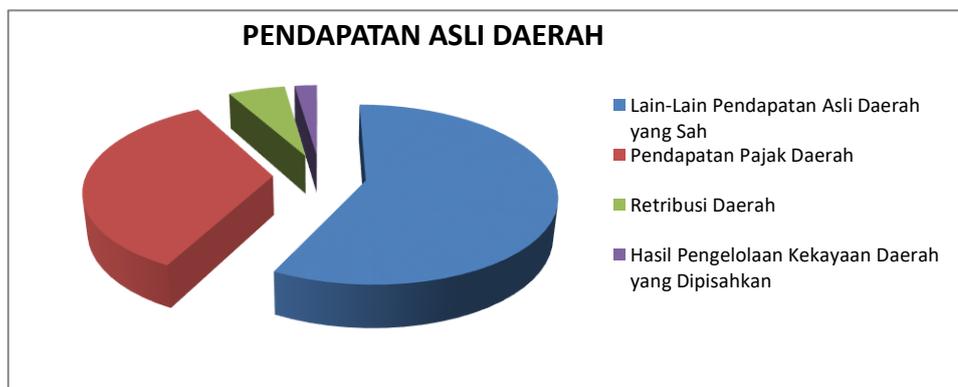
Tabel 3.51 Perkembangan PAD Kota Pekalongan Tahun 2018-2023

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	APBD	Proporsi terhadap APBD (%)
2018	199.813.870.000,00	179.224.408.698,00	905.231.572.568,00	19.80
2019	209.577.100.000,00	212.777.435.294,00	971.624.464.121,00	21.90
2020	172.993.386.000,00	229.867.935.361,00	953.155.394.615,00	24.12
2021	214.208.310.000,00	253.877.478.946,00	966.037.102.983,00	38,05
2022	255.833.693.000,00	263.476.822.025,66	993.236.017.754,66	26.52
2023	250.444.667.864,00	263.342.597.630,00	1.065.447.392.000,00	24,71

Sumber data : APBD Kota Pekalongan tahun 2018-2023

Dari tabel tersebut terlihat adanya peningkatan realisasi PAD dan penurunan proporsi pendapatan asli daerah terhadap APBD. Pada tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh Rp. 263.342.597.630,00 dari target Rp. 250.444.667.864,00 atau tercapai 105,15 % serta proporsi terhadap APBD hanya 24,71%. Sumbangan terbesar dari PAD Kota Pekalongan adalah berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 48,34%, disusul Pajak Daerah sebesar 40,25 %, retribusi daerah sebesar 8,78% dan terakhir Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2,64 %. Pendapatan Asli Daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3.5 Proporsi PAD Dalam APBD Tahun 2023



## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD Kota Pekalongan. Dalam 6 tahun terakhir pendapatan transfer Kota Pekalongan mendapat alokasi dana sebagai berikut :

Tabel 3.52 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Pekalongan Tahun 2017-2023

Tahun	Pendapatan Transfer	Perkembangan (%)	APBD	Proporsi terhadap APBD (%)
2017	723.917.506.314,00	6,92	915.920.377.495,00	79,04
2018	702.228.404.048,00	-3,00	905.231.572.568,00	77,57
2019	734.897.351.238,00	4,65	971.624.464.121,00	75,64
2020	700.838.013.854,00	-4,03	953.155.394.615,00	73,53
2021	686.765.223.608,00	-2,00	966.037.102.983,00	71,09
2022	729.759.195.729,00	5,89	993.236.017.754,66	73,47
2023	755.466.496.136,00	3,40	1.065.447.392.000,00	70,90

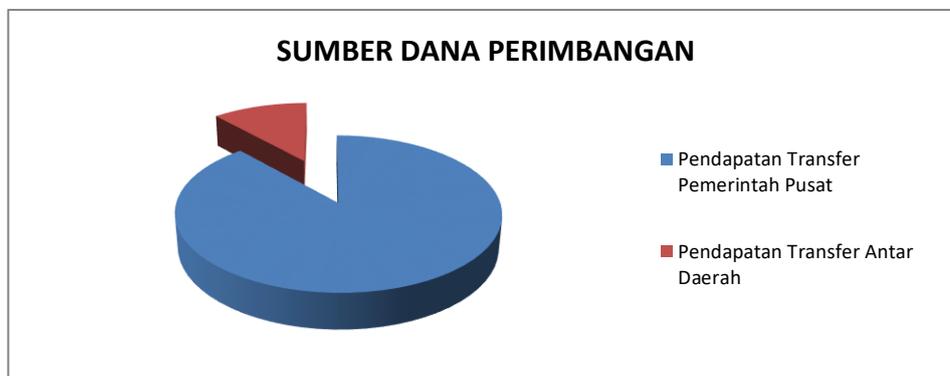
Sumber data : APBD Kota Pekalongan tahun 2017-2023

Pada tahun 2023, Pendapatan Transfer untuk Kota Pekalongan mengalami peningkatan sebesar 3,40 % dari tahun sebelumnya. Ketergantungan Kota Pekalongan pada Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap APBD Kota Pekalongan masih cukup besar dalam membiayai pembangunan Kota Pekalongan.

Adapun proporsi sumber-sumber Pendapatan Transfer dapat

dilihat pada gambar berikut :

Grafik 3.6 Proporsi Sumber Pendapatan Transfer Dalam APBD Kota  
Pekalongan Tahun 2023



### 3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Sumber penerimaan lainnya berasal dari lain-lain Pendapatan yang sah yang terdiri atas penerimaan dari Provinsi dan penerimaan dari pusat. Untuk lebih jelasnya Perkembangan Penerimaan lain – lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.53 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Kota Pekalongan Tahun 2017-2023

Tahun	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Perkembangan (%)	APBD	Proporsi terhadap APBD (%)
2017	-	-	915,920,377,495,00	-
2018	23.778.759.822,00	-	905,231,572,568,00	2,63
2019	23.949.677.589,00	0,72	971,624,464,121,00	2,46
2020	22.449.445.400,00	-6,26	953,155,394,615,00	2,36
2021	25.394.400.429,00	13,12	966.037.102.983,00	2,63
2022	136.650.762.348,66	438,11	993.236.017.754,66	13,75
2023	124.096.613.243,00	-10,12	1.065.447.392.000,00	11,65

Sumber data : APBD Kota Pekalongan tahun 2017-2022

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah di tahun 2023 mengalami penurunan yakni mencapai 10,12 %, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

### 3.3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Belanja-belanja tersebut masing-masing mempunyai fungsi untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

Tabel 3.54 Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota  
Pekalongan Tahun Anggaran 2023

Per 01 Januari s.d 31 Desember 2023 (*Unaudited tanggal 1 Maret 2024*)

No.	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi	
			Rp.	%
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>888.828.065.000,00</b>	<b>858.205.172.245,00</b>	<b>96,55</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	400.105.508.000,00	380.545.140.291,00	95,11
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	440.860.601.000,00	431.075.384.481,00	97,78
2.1.3	Belanja Hibah	45.387.251.000,00	44.257.036.973,00	97,51
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.474.705.000,00	2.327.610.500,00	94,06
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>173.119.327.000,00</b>	<b>170.653.380.598,00</b>	<b>98,58</b>
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.375.350.000,00	3.036.176.608,00	89,95
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.591.872.000,00	38.881.456.772,00	98,21
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.696.793.000,00	54.122.619.156,00	98,95
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	72.884.371.000,00	72.047.095.943,00	98,85
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.570.941.000,00	2.566.032.119,00	99,81
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>2.989.019.861,00</b>	<b>85,40</b>
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1.065.447.392.000,00</b>	<b>1.031.847.572.704,00</b>	<b>96,85</b>

Sumber data : APBD Kota Pekalongan tahun 2023, unaudit

## 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri atas : (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Hibah, (d) Belanja Bantuan Sosial.

Target dan Realisasi Belanja Pegawai selama periode Tahun Anggaran 2017-2023 lebih dari 93,30 persen.

Tabel 3.55 Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Pekalongan  
Tahun Anggaran 2017-2022

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2017	324.404.511.000,00	319.969.885.876,00	98.63	(4.434.625.124,00)
2018	331.186.337.000,00	352.531.365.055,00	106.45	21.345.028.055,00
2019	353.244.749.000,00	390.898.339.975,00	110.66	37.653.590.975,00
2020	350.943.107.000,00	394.421.563.850,00	112.39	43.478.456.850,00
2021	420.853.844.000,00	391.731.535.554,00	93.08	(29.122.308.446,00)
2022	402.701.524.000,00	375.746.032.856,00	93,30	(26.955.491.144,00)
2023	888.828.065.000,00	858.205.172.245,00	96,55	(30.622.892.755,00)

Sumber data : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017-2023

Target dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2017-2023 selalu meningkat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.56 Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota  
Pekalongan Tahun Anggaran 2017-2023

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2017	395.461.480.000,00	327.506.725.286,00	82.82	(67.954.754.714,00)
2018	392.160.021.000,00	317.053.705.432,00	80.85	(75.106.315.568,00)
2019	368.868.065.000,00	336.953.793.745,00	91.35	(31.914.271.255)
2020	340.770.147.000,00	327.664.407.878,00	96.15	(13.105.739.122,00)
2021	391.265.135.000,00	367.537.321.625,00	93.94	(23.727.813.357,00)
2022	428.282.140.000,00	414.517.599.372,02	96,78	(13.764.540.627,98)

2023	440.860.601.000,00	431.075.384.481,00	97,78	(9.785.216.519,00)
------	--------------------	--------------------	-------	--------------------

Sumber data : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017-2023

Target dan Realisasi Belanja Hibah selama periode Tahun Anggaran 2017-2023 lebih dari 92,94 persen.

Tabel 3.57 Target dan Realisasi Belanja Hibah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017-2022

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2017	19.564.144.000,00	45.614.517.972,00	233,15	26.050.373.972,00
2018	24.484.570.000,00	53.429.595.944,00	218,21	28.945.025.944,00
2019	33.307.241.000,00	30.031.913.000,00	90,166	(3.275.328.000,00)
2020	40.956.062.000,00	36.250.151000,00	88,50	(4.705.911.000,00)
2021	35.570.690.000,00	32.149.226.539,00	90,38	(3.421.463.461,00)
2022	40.685.631.000,00	37.814.800.008,00	92,94	(2.870.830.992,00)
2023	45.387.251.000,00	44.257.036.973,00	97,51	(1.130.214.027,00)

Sumber data : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017-2023

Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan periode Anggaran 2017-2022.

Tabel 3.58 Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017-2023

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2017	8.939.000.000,00	8.276.137.000,00	92.58	(662.863.000,00)
2018	12.454.000.000,00	11.865.819.000,00	95.28	(588.181.000,00)
2019	12.904.000.000,00	13.621.739.100,00	105.5 6	717,739,100.00
2020	3.348.500.000,00	2.206.98.000,00	65.91	(1.141.518.000,00)
2021	812.750.000,00	756.569.000,00	93.09	(56.181.000)
2022	4.081.069.000,00	3.155.969.470,00	77,33	(925.099.530,00)
2023	2.474.705.000,00	2.327.610.500,00	94,60	(147.094.500,00)

Sumber data : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017-2023

## 2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari : (a) Belanja Modal Tanah, (b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, (c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, (d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, (e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, (f) Belanja Modal Aset Lainnya.

Belanja Modal selama periode Tahun Anggaran 2017-2023 terealisasi seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.59 Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017-2023

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2017	242.710.481.000,00	220.686.788.384,00	90.93	(22.023.692.616,00)
2018	160.512.622.000,00	146.382.593.476,00	91.20	(14.130.028.524,00)
2019	202.046.925.000,00	182.153.984.579,00	90.15	(19.892.940.421,00)
2020	139.410.651.000,00	126.926.093.953,00	91.04	(12.484.557.047,00)
2021	178.869.825.000,00	160.513.725.170,00	89.74	(18.356.099.830,00)
2022	207.694.427.000,00	196.569.439.074,00	94,64	(11.124.987.926,00)
2023	173.119.327.000,00	170.653.380.598,00	98,58	(2.465.946.402,00)

Sumber data : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017-2023

## 3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga kepada Kabupaten/Kota selama periode Tahun Anggaran 2017-2023 kurang dari 100% sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.55 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017-2023

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2017	2.250.000.000,00	1.570.263.564,00	69.79	(679.736.436,00)
2018	4.400.000.000,00	1.921.815.800,00	43.68	(2.478.184.200,00)
2019	2.750.000.000,00	730.438.928,00	26.56	(2.019.561.072,00)
2020	63.616.165.000,00	57.371.261.995,00	90.18	(6.244.903.005,00)
2021	13.833.837.000,00	9.403.414.116,00	67.97	(4.430.422.884,00)

2022	6.742.995.000,00	3.909.447.664,00	57,97	(2.833.547.336,00)
2023	3.500.000.000,00	2.989.019.861,00	85,40	(510.980.139,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017-2022

### 3.3.3 Kondisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Perkembangan Pembiayaan Kota Pekalongan periode tahun anggaran 2017-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.61 Perkembangan Pembiayaan Kota Pekalongan tahun 2017-2023

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran
2017	96.715.538.571,00	9.800.000.000,00
2018	78.606.608.989,00	12.725.079.674,00
2019	92.028.388.994,00	13.896.741.750,00
2020	108.747.997.650,61	4.520.630.000,00
2021	112.550.304.136,00	1.500.000.000,00
2022	115.326.672.000,00	10.120.000.000,00
2023	68.808.505.766,00	11.452.601.530,00

Sumber data : APBD Kota Pekalongan tahun 2017-2022

Selama tahun 2017-2023 Kota Pekalongan mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang didapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih anggaran tahun lalu. Untuk tahun 2023 SILPA sebesar Rp. 53.925.975.806.

### 3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

Dalam kurun waktu tahun 2022 - 2023 Pemerintah Kota Pekalongan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahun 2022

- a. Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan RI
- b. Penghargaan Pengawasan Arsip Peringkat V Nasional dari ANRI
- c. Penghargaan sebagai Kota terbaik pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah
- d. Penghargaan Kinerja Pelayanan Publik Terbaik dengan nilai A-

- e. Penghargaan Menuju 100 Smart City Dari Kementrian Kominfo
- f. Penghargaan Anugerah Meritokrasi Tahun 2022 Dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN)
- g. Kategori Perintis Terbaik I Aksi Konvergensi Penurunan Stunting
- h. Predikat “BB” dalam Penganugerahan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi
- i. Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dari Komisi Informasi Jawa Tengah Kategori Pemerintah Kota Informatif dan RSUD Informatif
- j. Penganugerahan Predikat Standar Pelayanan Publik terbaik ke IV tahun 2022
- k. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ke-tujuh kali dari BPK

## **2. Tahun 2023**

- a. *Best Prectice* Pengelolaan Keuangan BLUD Berbasis Sistem Informasi Terintegrasi Dari Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Dalam Negeri
- b. Penghargaan WTP ke 8 Kali secara berturut turut oleh BPK
- c. Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar Pemda Transformatif Sub Kategori Pencegahan 3 Dosa Besar Pendidikan
- d. Penghargaan Implementasi *Core Value* ASN BerAKHLAK dari ACT (Accelerated Culture Transformation), penghargaan yang diterima yaitu yaitu :
  - 1) 5 Besar Pemerintah Kab./Kota dengan Indeks Implementasi Ber-Akhlak
  - 2) 5 Besar Pemerintah Kab/Kota dengan indeks implementasi nilai “Kompeten”
  - 3) 10 Besar Pemerintah Kab/Kota dengan Indeks Implementasi nilai “Berorientasi Pelayanan”
- e. Penganugerahan penghargaan Bangga Kencana dari BKKBN, penghargaan yang diterima yaitu yaitu :
  - 1) Kategori Manggala Karya Kencana diraih oleh Walikota Pekalongan
  - 2) Kategori Manggala Karya Kencana diraih oleh Ketua TP PKK Kota

## Pekalongan

### 3) Kategori Wira Karya Kencana diraih oleh Kepala UPT Puskesmas Pekalongan Selatan

- f. Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2023
- g. Penghargaan dan deklarasi Kota Pekalongan mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) Tahun 2023
- h. Kepala Daerah Peduli Pendidikan dengan Program #BrayanSinau Implementasi Kurikulum Merdeka
- i. Penghargaan kategori Wiyata Darma Madya Kab/Kota non tertinggal dari Kemendikbud Ristek Dikti
- j. Walikota Pekalongan dianugerahi tanda penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia
- k. RSUD Bendan Kota Pekalongan menerima penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2023 oleh Kementerian PAN RB
- l. Predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Jawa Tengah
- m. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2023 kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- n. Penghargaan terbaik peringkat empat tingkat nasional Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Ombudsman RI
- o. Penghargaan Satria Leader Awards 2023 Kategori Satria Ekonomi Kreatif oleh Suara Merdeka Network
- p. Anugerah Meritrokrasi Tahun 2023 oleh Komisi Aparatur Sipil Negara
- q. Penghargaan Sistem Merit Award 2023 pada lingkup kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
- r. Penghargaan Kabupaten Kota Sehat dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2023 oleh Kementerian Kesehatan
- s. Peringkat dua penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 dari Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian, analisis dan evaluasi atas 24 sasaran dan 30 indikator kinerja utama, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan berupaya untuk mewujudkan dan mencapai kinerja yang telah dituangkan/ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan bertekad untuk membangun sistem akuntabilitas kinerja yang akuntabel melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (SAKIP). Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen dari jajaran pimpinan yang semakin kuat dan memahami arti pentingnya akuntabilitas kinerja, adanya semangat dari OPD untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik, adanya penyusunan evaluasi dan revisi RPJMD dan Renstra, serta penyusunan cascading kinerja sehingga dokumen perencanaan lebih selaras dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta diimplementasikannya sistem pelaporan akuntabilitas kinerja berbasis elektronik (e-SAKIP).

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 24 sasaran strategis, disimpulkan bahwa Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar **"89,83"** dengan kategori **"Berhasil"**. Dari 24 capaian sasaran strategis, sebanyak 19 sasaran (79,16%) dengan kategori "Sangat Berhasil", 2 sasaran (8,33%) dengan kategori "Cukup Berhasil", 1 sasaran (4,16%) dengan kategori "Sangat Tidak Berhasil", 2 sasaran (4,16%) belum dapat dikategorikan karena data belum tersedia.

Pengukuran terhadap 30 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 23 indikator (76,66%) dikategorikan "Sangat berhasil", 1 indikator (3,34%) dikategorikan "Berhasil", 3 indikator (10,00%) dikategorikan "Tidak Berhasil", 1 indikator (3,33%) dikategorikan "Sangat Tidak Berhasil", 2 indikator (6,66%) belum dapat dikategorikan karena data belum tersedia.

Adapun 4 indikator kinerja yang masih perlu mendapatkan perhatian :

1. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan Sampai dengan tahun 2023, terdapat 4 (empat) regulasi yang telah diterbitkan. Ketidaktercapaian target yang harusnya terdapat 6 (enam) regulasi yang terbit dikarenakan proses penyusunan Peraturan Perencanaan Tata Ruang yang melalui beberapa tahap dan melibatkan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sehingga

kedepannya, akan dilakukan penguatan koordinasi antar *stakeholder*.

2. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM, dimana DPMPTSP Kota Pekalongan dan Dinarpus Kota Pekalongan berhasil memperoleh predikat WBK oleh Kementerian PAN & RB. Sedangkan untuk tahun 2023 hanya RSUD Bendan yang berhasil memperoleh predikat WBK. OPD lain yang diusulkan melaksanakan zona integritas menuju WBK/WBBM tidak ada yang lolos sehingga hanya menambah 1 OPD penyandang predikat WBK/WBBM di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Hal ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

- a. Pembangunan zona integritas menuju WBK kurang dari satu tahun;
- b. Mitigasi risiko belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga masih ditemui risiko-risiko operasional yang dapat mengganggu proses bisnis utama;
- c. Belum terlihat adanya manajemen kinerja yang dipraktikkan guna memastikan kinerja utama yang diperjanjikan akan tercapai dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian OPD menuju WBK/WBBM, maka akan ditempuh strategi :

- a. Meningkatkan penerapan pembangunan zona integritas pada enam area perubahan secara berkelanjutan untuk meningkatkan integritas dan pelayanan kepada *stakeholders*;
  - b. Membangun komunikasi dan kedekatan yang lebih intensif dengan pengguna layanan dan *stakeholders* sehingga dapat mengurangi gap antara harapan pengguna layanan dengan kinerja layanan yang diberikan;
  - c. Melakukan internalisasi lebih menyeluruh kepada seluruh pegawai terkait pemahaman atas pembangunan zona integritas serta melakukan *monev* secara berkala atas penerapan zona integritas
3. Angka Kematian Bayi pada tahun 2023 sebesar 13,71 dengan jumlah kasus kematian sebanyak 67 kasus. Angka tersebut tidak berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 7,79. Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi:
    - a. Deteksi resiko pada ibu hamil dan ibu bersalin;

- b. Deteksi resiko pada bayi;
  - c. Optimalisasi sistem rujukan;
  - d. Edukasi tentang tanda bahaya bayi berisiko tinggi;
  - e. Peningkatan kapasitas petugas dalam menangani bayi berisiko;
  - f. Fasilitasi jaminan pembiayaan UHC bagi BBL berisiko/sunting;
  - g. Pemenuhan sarana penunjang tatalaksana BBL di Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
  - h. Peningkatan kualitas ANC terpadu;
  - i. Penguatan lintas sektor/jejaring dalam skrining dan deteksi bayi, balita dengan risiko tinggi.
4. Angka Kematian Balita pada tahun 2023 sebesar 18,42 per 1.000 KH dengan jumlah kasus kematian sebanyak 90. Angka tersebut tidak berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 9,92. Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi:
- a. Kegiatan deteksi resiko pada balita melalui saber AKB;
  - b. Optimalisasi posyandu dalam skrining awal kesehatan balita;
  - c. Edukasi ke masyarakat tentang pentingnya gizi bagi kesehatan balita;
  - d. Edukasi ke masyarakat tentang tanda bahaya bagi balita;
  - e. Fasilitasi jaminan pembiayaan UHC bagi BBL berisiko/stunting;
  - f. Pemenuhan sarana penunjang tatalaksana BBL di poned;
  - g. Peningkatan kualitas ANC terpadu;
  - h. Penguatan lintas sektor/jejaring dalam skrining dan deteksi bayi, balita risiko tinggi.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat beberapa indikator strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi masyarakat dan semua pihak.



  
**Pekalongan**  
*World's City of Batik*